

SINERGI

BULETIN BPIW

Media Informasi & Komunikasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR

KEMENTERIAN PUPR
BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH



www.bpiw.pu.go.id



Edisi 16/April 2017

Percepatan Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia

Kualitas Kebersihan KSPN
Jadi Tantangan Besar

Peningkatan Keseimbangan antar Kawasan
dan Pengelolaan Persampahan di KSPN



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH (BPIW) KEMENTERIAN PUPR**

INFRASTRUKTUR PUPR TERPADU UNTUK NEGERI

Gedung BPIW Lantai 1

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210

Email: humasbpiw@gmail.com

Telp. +6221-2751 5804

SINERGI

BULETIN BPIW

Pelindung:

Rido Matari Ichwan

Penasehat:

Dadang Rukmana

Pengarah:

Bobby Prabowo
Iwan Nurwanto
Hadi Suahyono
Agusta Ersada Sinulingga

Pemimpin Redaksi:

P. Yudiantoro

Redaktur Pelaksana:

Shoviah

Redaksi:

M. Salahudin Rasyidi
Mochammad Tranggono
Hari Suharto Diyaksa
Erwin Adhi Setyadi
Wahyu Hendrastomo
Melva Eryani Marpaung

Editor :

Hendra Djamal

Kontributor:

Mutri Batul Aini
Indira Dwi Kusumatuti
Daris Anugrah
Andhika Prabowo

Diterbitkan oleh:

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
(BPIW) Kementerian PUPR

Alamat Redaksi:

Gedung G, BPIW Lantai 1
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 11210
Email: humasbpiw@gmail.com
humasbpiw@pu.go.id
Website: www.bpiw.pu.go.id
Twitter: @informasiBPIW
Youtube: Layanan informasi BPIW
Facebook: BPIWkementerianPUPR
No. Telp. +6221-2751 5804

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:
humasbpiw@gmail.com

Design : Heri Hito
Kartunis: Oki Heryanto

SALAM REDAKSI

.....

Pembaca yang budiman, pada Buletin Sinergi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) edisi bulan April ini kami akan menfokuskan mengenai pemerataan pembangunan infrastruktur antar kawasan. Kabar Utama akan mengupas mengenai rencana pengembangan Kawasan Indonesia Timur.

Dalam membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut, kami menghadirkan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Iwan Nurwanto. Pada rubrik tersebut dibahas seputar arah kebijakan dan prioritas nasional dalam program PUPR dalam mendukung pemerataan pembangunan.

Untuk laporan khusus dibahas mengenai Dukungan Infrastruktur PUPR dalam Pengelolaan Persampahan di 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Pembaca juga dapat menikmati sajian informasi mengenai kegiatan BPIW sepanjang bulan April, melalui rubrik Kilas BPIW. Tidak hanya itu, sajian ringan juga telah disiapkan tim redaksi seperti rubrik Jalan-Jalan yang menampilkan jalan di Kota Ternate. Kemudian dalam rubrik Tips dibahas mengenai cerdas menjadi lebih inovatif di tempat kerja. Kemudian pada rubrik Glossary menampilkan istilah tentang penataan ruang serta rubrik Serba-serbi mengulas tentang Air.

Kami berharap apa yang disajikan dapat memperkaya wawasan pembaca.

Selamat membaca.

daftar isi

Edisi 16 - April 2017



- 01 SALAM REDAKSI
- 02 DAFTAR ISI
- 03 PERSPEKTIF

Peningkatan Keseimbangan antar Kawasan dan Pengelolaan Persampahan di KSPN

- 04 KABAR UTAMA
- Percepatan Pembangunan Infrastruktur PUPR di Kawasan Timur Indonesia

- 10 REVIEW
- Penataan Ruang Pembangunan Perkotaan

- 11 GLOSSARY
- Istilah Tentang Ruang



- 12 WAWANCARA
- Ir. Iwan Nurwanto, M.Soc.Sci: Tantangan Pekerjaan menjadi Sesuatu yang menyenangkan

- 16 TEROPONG MEDIA
- Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak



- 18 KILAS BPIW
- Kementerian PUPR Siapkan Dukungan Infrastruktur Untuk Tiga Kabupaten di Provinsi Aceh

- 36 LAPORAN KHUSUS
- Kualitas Kebersihan KSPN Jadi Tantangan Besar

- 40 OPINI
- Menyusun Program Tanpa Melupakan Pembiayaan

- 46 INFOGRAFIS
- Sistem Konektivitas Pulau Kalimantan

- 48 JALAN-JALAN
- Wisata Bersejarah Di Kota Seribu Benteng

- 50 WPS CORNER
- Wilayah Pengembangan Strategis 23 & 24

- 52 TEKNOLOGI
- Judesa, Teknologi Jembatan Fleksibel dan Ekonomis

- 54 POTRET
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

- 60 TIPS
- 8 Tips Agar Selalu Berinovasi di Tempat Kerja

- 61 TOKOH
- Frans Lebu Raya: Pembangunan Infrastruktur di NTT Memerlukan Dukungan Kementerian PUPR



Peningkatan Keseimbangan Antar Kawasan dan Pengelolaan Persampahan di KSPN

Guna meningkatkan keseimbangan pembangunan antar kawasan, terutama Kawasan Indonesia Timur (KIT) dan Kawasan Indonesia Barat (KIB). Saat ini pemerintah tengah melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam, sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur, dan pengembangan teknologi.

Dalam pemerataan pembangunan wilayah ini, 7 pulau diprioritaskan pada tema-tema khusus. Antara lain, Pertama, Papua diproyeksikan sebagai lumbung pangan, pengembangan peternakan dan tanaman non-pangan. Kedua, Maluku diproyeksikan sebagai produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional.

Ketiga, Nusa Tenggara diproyeksikan sebagai pintu gerbang wisata ekologis. Keempat, Sulawesi diproyeksikan menjadi gerbang industri logistik, lumbung pangan nasional, industri perikanan dan wisata bahari.

Kelima, Kalimantan diproyeksikan sebagai paru-paru dunia, lumbung energi nasional. Keenam, Jawa-Bali diproyeksikan lumbung pangan nasional dan pendorong sektor industri nasional. Ketujuh, Sumatera diproyeksikan gerbang Indonesia dalam perdagangan Internasional, lumbung energi nasional.

Di sisi lain, untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kawasan Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas, saat ini diperlukan inovasi dan antisipasi peningkatan volume sampah, agar kebersihan dan keindahan destinasi wisata dapat tetap terpelihara dengan baik

Terpeliharanya kebersihan dan keindahan di destinasi wisata, diharapkan dapat mendukung tercapainya target pariwisata

nasional berupa jumlah kunjungan turis asing 20 juta di tahun 2019.

Saat ini, Kementerian PUPR melakukan pengembangan infrastruktur menerapkan metode yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya terkelompokan pada 35 WPS. Pengelompokan ini bertujuan untuk mendapatkan titik-titik strategis dalam pengembangan infrastruktur, termasuk infrastruktur untuk pengelolaan persampahan.

Dalam perencanaan dukungan terhadap pengembangan KSPN dilakukan dengan penyusunan *Masterplan* dan *Development Plan* (MPDP) WPS yang memuat program 10 tahunan, 5 tahunan, yang kemudian didetailkan ke dalam program jangka pendek dan tahunan. Untuk infrastruktur pengelolaan sampah merupakan bagian perincian lebih lanjut dari MPDP yang ditelaah disusun.

10 KSPN prioritas, ungkap Rido, saat ini meliputi KSPN Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Wakatobi, Labuan Bajo dan Morotai.

Upaya pengelolaan sampah yang dapat dikembangkan untuk menangani persampahan di KSPN dapat berbentuk pengembangan tempat pembuangan sampah (TPS) baru, pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di sekitar kawasan wisata serta penanganan sampah yang komprehensif. Artinya, penanganan sampah perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari destinasi wisata hingga kawasan sekitarnya.**



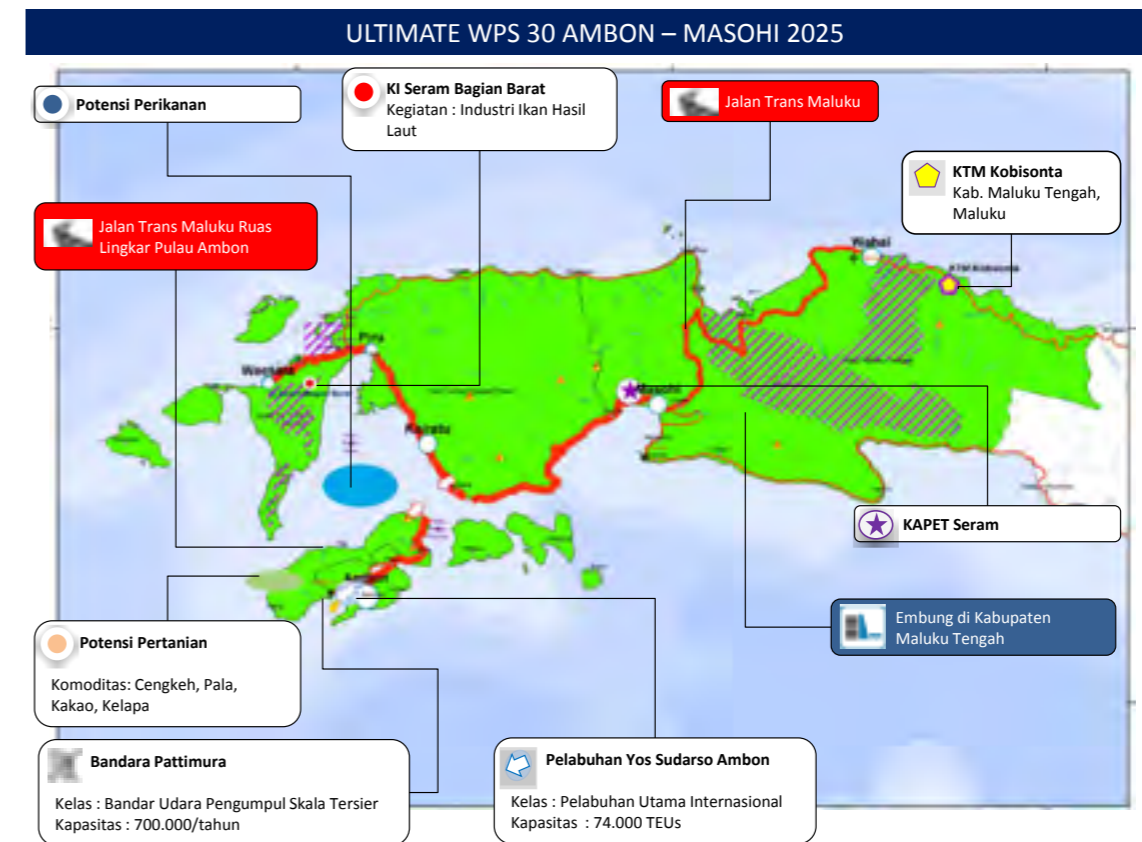
Percepatan Pembangunan Infrastruktur PUPR di Kawasan Timur Indonesia

Kawasan Timur Indonesia (KTI) kini menjadi fokus pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal ini sebagai bagian dari amanah Nawa Cita yakni membangun dari pinggiran. Pembangunan di KTI juga dilakukan untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah menyiapkan sejumlah program untuk percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut.



Pembangunan jalan Trans Papua

Sumber: Dok. PUPR



Berdasarkan Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, wilayah yang termasuk ke dalam Kawasan Timur Indonesia (KTI) adalah semua wilayah di Indonesia selain wilayah Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Dengan demikian yang termasuk KTI adalah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua.

Kondisi riil yang terjadi saat ini adalah fenomena kesenjangan wilayah, dimana KBI banyak dipandang lebih menikmati hasil pembangunan dibandingkan KTI. Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengakui bahwa masalah tersebut merupakan salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur PUPR.

“Sebagai unit organisasi yang memiliki gugus tugas menterpadukan pengembangan infrastruktur PUPR, BPIW telah melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut,” ucap Rido beberapa waktu lalu. Menurutnya hal ini dilakukan agar pembangunan infrastruktur lebih proporsional antara KBI dan KTI.

KBI seringkali dianggap lebih berkembang dibandingkan dengan KTI. Kondisi tersebut terlihat antara lain dari proporsi sumbangan daerah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. KBI menyumbangkan sekitar 75 persen dari total PDB Nasional, sementara KTI hanya menyumbangkan kurang lebih 25 persen. Padahal

sebagian besar kekayaan alam Indonesia berada di KTI. Hal ini menunjukkan konsentrasi kekayaan dan aktivitas ekonomi yang masih cenderung terfokus di KBI.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Hadi Sucahyono mengatakan untuk mengurangi disparitas tersebut harus dilakukan dengan cara pareto yakni pembangunan infrastruktur digenjut untuk membuat kondisi membaik. “Bila jarak disparitas itu jauh, maka semestinya pertumbuhan pembangunan infrastruktur KBI naik pelan dan KTI naik dengan cepat,” ujar Hadi saat ditemui di ruang kerjanya, akhir April lalu.

Langkah nyata yang telah dilakukan menurut Hadi terlihat dari sisi kucuran APBN di pulau yang ada di KTI ini. Dicontohkannya bila dulu, anggaran pembangunan infrastruktur untuk Pulau Papua hanya Rp 1 - Rp 2 triliun per tahun. Namun saat ini mencapai Rp 4 - Rp 5 triliun per tahun. “Jadi pembangunan infrastruktur di Sumatera dan Jawa naiknya sedikit, tapi di Papua misalnya, justru lebih cepat,” ungkap Hadi.

Pembangunan infrastruktur PUPR untuk KTI ini antara lain dengan rencana lanjutan menyambung jalan lintas Kalimantan (jalan poros utara 703 km, poros tengah 109,2 km, dan lintas menuju perbatasan 479,6 km), jalan lintas Sulawesi (±4.284 km), dan dukungan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai seluas

“Sebagai unit organisasi yang memiliki gugus tugas menterpadukan pengembangan infrastruktur PUPR, BPIW telah melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut,” ucap Rido

Langkah nyata yang telah dilakukan menurut Hadi terlihat dari sisi kucuran APBN di pulau yang ada di KTI ini. Dicontohkannya bila dulu, anggaran pembangunan infrastruktur untuk Pulau Papua hanya Rp 1 - Rp 2 triliun per tahun. Namu saat ini mencapai Rp 4 - Rp 5 triliun per tahun.

1100 ha. Selain itu dilakukan pembangunan Bendung Di Trukat 2800 ha, dukungan pengembangan KEK Sorong (Pantai Mariat 1000 ha, Arar 6000 ha, dan Pelabuhan Sigret 7500 ha), serta lanjutan pembangunan jalan lintas Papua yang belum tersambung (±1.400 km).

Pembangunan di Kawasan Strategis seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi, KSPN Morotai, KSPN Raja Ampat, dan Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, juga menjadi prioritas pengembangan infrastruktur di KTI. Selain itu, Kawasan Perbatasan Indonesia-Laut China Selatan, Kawasan Wisata Bahari Desa Oele, dan Kawasan Food Estate Merauke.

Dikatakannya juga bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di KTI juga diiringi dengan pengembangan wilayah, dimana di Indonesia terbagi dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Hal ini sejalan dengan pesan-pesan Nawa Cita dan esensi dari konsep WPS, yaitu pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah.

Pengembangan infrastruktur pada kawasan-kawasan pertumbuhan tersebut, diarahkan untuk dapat mempengaruhi pertumbuhan kawasan-kawasan di sekitarnya, sehingga dalam kerangka WPS, akan didapatkan daya ungkit pembangunan infrastruktur berupa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Bila kita melakukan pembangunan infrastruktur berbasis WPS, maka didalamnya juga terkait pembangunan yang dilakukan sektor lain, seperti pembangunan kereta api dan pelabuhan. Presiden

Joko Widodo beberapa waktu lalu mengingatkan, bahwa jangan sampai pembangunan bandara misalnya, tidak ada akses jalannya. Jadi harus dilakukan bersama-sama," tegas Hadi.

Dari 35 WPS yang ada di Indonesia, 19 WPS berada di KTI, dimana BPIW telah membuat *masterplan* dan *development plan* di kawasan tersebut. Ke-19 WPS tersebut yakni, Pulau Nusa Tenggara terdapat 4 WPS. Keempat WPS itu adalah WPS 16 Tanjung-Mataram-Mandalika, WPS 17 Sumbawa Besar-Domou-Bima, WPS 18 Waingapu-Labuan Bajo-Ende-Maumere, dan WPS 19 Kupang-Atambua.

Salah satu *development plan* yang dibuat BPIW di Pulau Nusa Tenggara ini, adalah *Development Plan* WPS 16 Tanjung-Mataram-Mandalika periode 2015-2019. Dalam WPS 16 ini beberapa program yang dilaksanakan pada tahun 2016 yakni Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi)-Mataram dan Pembangunan Jaringan Irigasi Embung Baya di Kabupaten Lobok Utara di tahun 2015.

Selanjutnya, di Pulau Kalimantan terdapat 4 WPS, yakni WPS 20 Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas, WPS 21 Temajuk-Sebatik, WPS 22 Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin, dan WPS 23 Balikpapan-Samarinda-Maloy.

Untuk pulau ini, salah satu yang telah dibuat BPIW adalah *Development Plan* WPS 21 Temajuk-Sebatik 2015-2019. Pada WPS 21 itu beberapa program yang dilaksanakan seperti pembangunan Jalan Akses Temajuk-Aruk tahun 2016 dan Peningkatan Kualitas Permukiman Perdesaan Perbatasan Kab. Kapuas Hulu di tahun yang sama.



Rumah khusus pengungsi ex Timtim di Belu NTT

Sumber: PUPR

Kemudian di Pulau Sulawesi terdapat 5 WPS, yakni WPS 24 Bitung-Manado-Amurang-Kotamobagu, WPS 25 Gorontalo-Kotamobago, WPS 26 Palu-Banggai, WPS 27 Mamuju-Makale-Palopo-Kendari-Bau Bau-Wangi Wangi, dan WPS 28 Makassar-Pare Pare-Mamuju.

Salah satu yang telah dilakukan BPIW adalah membuat *Development Plan* WPS 27 Mamuju-Makale-Palopo-Kendari-Bau Bau-Wangi Wangi 2015-2019. Pada WPS 27 ini diprogramkan beberapa pembangunan infrastruktur seperti Program Bantuan Rumah Umum Tapak melalui KPR-FLPP untuk Kab. Mamuju pada tahun 2018-2019 dan Pembangunan Pengendali Banjir dan Normalisasi Sungai Mamasa pada tahun 2015.

Sedangkan untuk Pulau Maluku ada 2 WPS, yakni WPS 29 Ternate-Soffi-Daruba dan WPS 30 Ambon-Masohi. Pulau Papua terdapat 4 WPS, yakni WPS 31 Sorong-Manokwari, WPS 32 Biak-Manokwari-Bintuni, WPS 33 Nabire-Enarotali-Wamena, dan WPS 34 Jayapura-Merauke.

Dari 4 WPS tersebut, salah satu yang dibuat BPIW adalah *Development Plan* WPS 29 Ternate-Soffi-Daruba 2015-2019. Beberapa program yang dibuat seperti Pembangunan TPA Kota Soffi yang direncanakan tahun 2017 ini dan Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian Utara pada tahun 2018-2019.

Dengan adanya Review Renstra menurut Hadi dapat dijadikan momentum untuk menyempurnakan WPS, karena ada perkembangan baru yang perlu diakomodir. "Jadi peta WPS yang akan dimasukkan di dalam Renstra, perlu kita sempurnakan. Dengan penyempurnaan ini, jumlah WPS bisa tetap atau bisa juga berkurang," tutur Hadi.

Beberapa perubahan yang terjadi saat ini menurut Hadi seperti Morotai di Maluku yang menjadi salah satu KSPN. Selain itu dari segi pertumbuhan ekonomi ada Blok Masela yang merupakan kawasan penghasil minyak. Dengan adanya *review* Renstra ini menurut Hadi dilakukan penajaman atau penyempurnaan dan bukan menghilangkan konsep WPS.

"Itu yang menjadi tren sekarang, dan dulu saat Renstra dibuat tahun 2015, hal itu belum ada. Jadi kalau dilihat WPS Maluku, fokusnya hanya di Ambon saja, tapi sekarang ada Morotai dan Blok Masela, yang seperti ini harus kita sempurnakan," ulas Hadi.

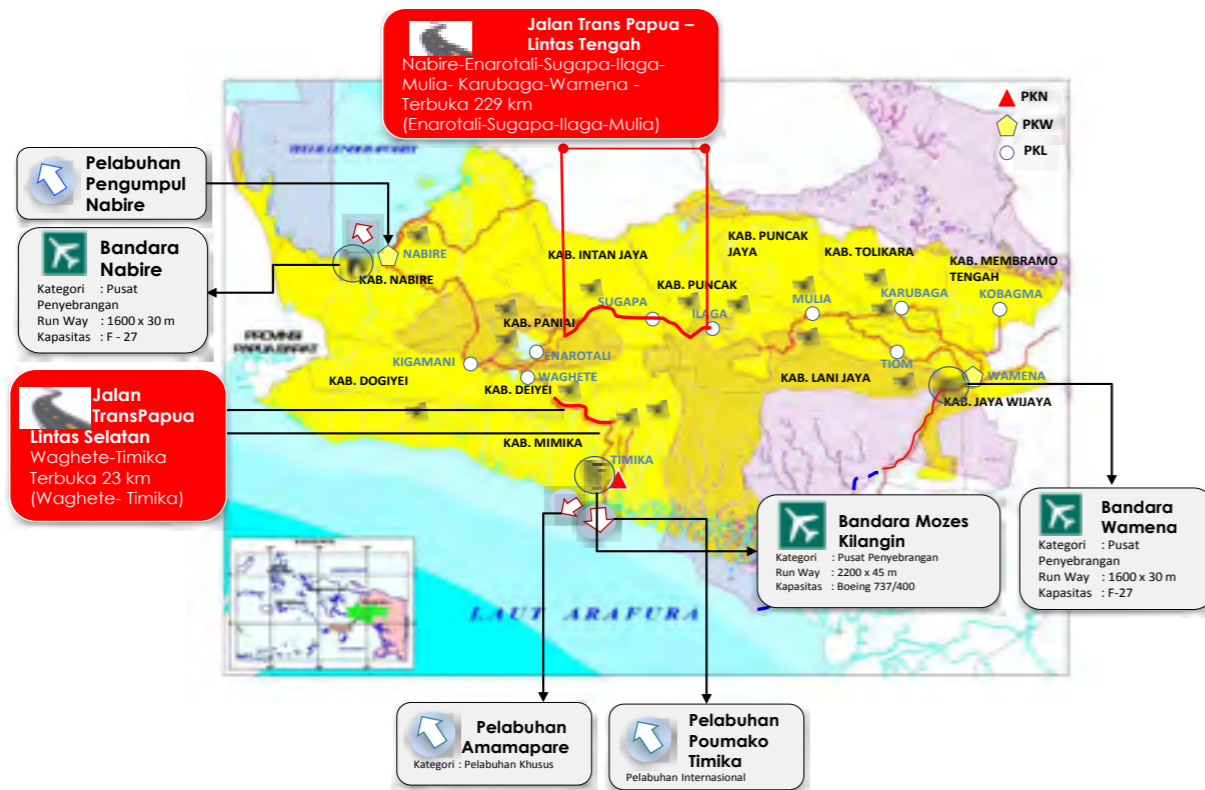
Selain itu, yang bisa dimasukkan dalam perubahan WPS menurut Hadi adalah pengembangan kawasan Kulonprogo. Hal ini seiring dengan rencana pembangunan bandara di daerah tersebut. "Kalau dulu, rencana pembangunan bandara juga belum ada, tapi sekarang Presiden minta itu segera dibangun. Oleh karenanya, kita bisa memasukkan

Ultimate WPS 29 (Ternate Soffi -Daruba)



Dari 35 WPS yang ada di Indonesia, 19 WPS berada di KTI, dimana BPIW telah membuat *masterplan* dan *development plan* di kawasan tersebut.

ULTIMATE WPS 33 NABIRE-ENAROTALI-WAMENA 2025



dukungan pengembangan kawasan sekitar bandara Kulonprogo ke dalam WPS,” tutur Hadi.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam membangun infrastruktur di KTI menurut Hadi, antara lain kondisi alam yang berbeda dengan KBI. Kondisi alam ini seperti topografi yang curam dan berbukit-bukit, seperti di Sulawesi dan Papua. Kemudian, jenis tanah yang kering yang sulit menahan air seperti di Nusa Tenggara Timur dan luasnya lahan gambut seperti di Kalimantan.

Tidak hanya itu, kondisi alam berupa pulau-pulau kecil yang terpisah lautan seperti di kepulauan Maluku menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur. Kondisi ini tentu juga mempengaruhi besaran dana yang diperlukan untuk melakukan pembangunan infrastruktur di KTI dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur di KBI.

“Tantangan di KTI juga seperti APBD yang terbatas dan skill dari lulusan perguruan tinggi yang perlu ditingkatkan. Hal ini penting, karena KTI punya banyak potensi seperti gas dan pertambangan emas,” imbuh Hadi.

Tantangan lain yaitu kondisi sosial, antara lain kapasitas tenaga kerja konstruksi yang perlu ditingkatkan, pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur pada lahan yang berstatus sebagai tanah ulayat, dan budaya sanitasi yang kurang sehat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, maka sesuai Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang PUPR secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur PUPR yang handal dan mendorong peningkatan daya saing nasional. Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi:

- 1) Peningkatan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Langkah ini dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air.
- 2) Dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Hal ini dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatan pelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan;
- 3) Dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman

di perkotaan dan perdesaan akan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, dan penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*).

Penurunan kurangnya tempat tinggal ini dilakukan melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan. Selain itu dengan peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

Kemudian, strategi yang bersifat kelembagaan dilakukan dengan, pertama, melalui peningkatan keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, klaster industri maupun perdesaan, peningkatan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, klaster industri maupun perdesaan dengan melakukan peningkatan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

Kedua, melalui peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia PUPR. Hal ini sesuai dengan persyaratan jabatan, peningkatan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Iptek bidang PUPR oleh *stakeholders*, dan peningkatan kualitas layanan teknis bidang

PUPR kepada *stakeholders*. Selanjutnya dilakukan peningkatan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, peningkatan kualitas dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk target pembangunan infrastruktur di KTI periode 2015-2019 antara lain pembangunan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 33,12 km, jalan tol Manado-Bitung sepanjang 13,50 km dari total 1.060 km jalan tol baru yang ditargetkan hingga 2019. Selain jalan tol, target lainnya adalah penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa jalan nasional/jalan strategis non tol jalan lingkar Trans Morotai, jalan Palu-Parigi, jalan penghubung Gorontalo-Manado, dan jalan Trans Maluku sebanyak 7 ruas.

Dari total rencana pembangunan 65 bendungan sampai 2019, maka sebanyak 26 bendungan berlokasi di KTI seperti Marangkayu (Kalimantan Timur), Teritip (Kalimantan Timur), Karalloe (Sulawesi Selatan), Raknamo (NTT), Lolak (Sulawesi Utara), Bintang Bano (NTB), Tanju (NTB), Mila (NTB), dan Passeloreng (Sulawesi Selatan).

Hadi juga menyatakan pembangunan infrastruktur di KTI juga perlu diukur setiap tahun, sehingga dapat diketahui, sampai sejauhmana membaiknya kondisi infrastruktur di kawasan ini. “Jadi harus terukur, seberapa jauh disparitas itu berkurang. Dengan demikian dapat kita bandingkan, misalnya berapa banyak jaringan jalan yang sudah dibangun dan berapa penambahannya,” tukas Hadi. **Tim Redaksi**

Hadi juga menyatakan pembangunan infrastruktur di KTI juga perlu diukur setiap tahun, sehingga dapat diketahui, sampai sejauhmana membaiknya kondisi infrastruktur di kawasan ini.



Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain NTT

Sumber: PUPR



Penataan Ruang Pembangunan Perkotaan

Kota yang merupakan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya manusia yang paling rumit dan muskil sepanjang peradaban. Begitu banyak masalah bermunculan akibat pertarungan kepentingan berbagai pihak yang latar belakang, visi, misi, dan motivasinya berbeda satu sama lain. Struktur, bentuk dan wajah serta penampilan kota, merupakan hasil dari penyelesaian konflik perkotaan yang selalu terjadi, dan mencerminkan perkembangan peradaban warga kota maupun pengelolanya.

Pemahaman terhadap interaksi yang terjadi antarpelaku pembangunan perkotaan, dan kajian yang mendalam terhadap alternatif pemecahan masalah perkotaan sekaligus upaya pencapaian tujuan dan sasaran kota yang ideal, akan memberikan pencerahan yang diperlukan untuk terciptanya kota yang manusiawi dan berkepribadian.

Pendapat yang melenceng bahwa kota-kota besar merupakan sebetulnya “*grand accident*” yang di luar kemampuan manusia untuk mengontrolnya, sepatutnya disanggah. Para ilmuwan, pakar dan professional dalam bidang perencanaan, pelaksana, pengawasan, dan pengelolaan perkotaan (secara ringkas dapat dirangkum dalam pengertian “*urban management*”), ditantang untuk memikirkan upaya membenahi centang perenang perkotaan di Indonesia.

Pemikiran manusia yang dinamis merupakan esensi yang sangat hakiki dari keberadaannya, sebagaimana disebutkan oleh Descartes: “Saya berfikir, maka saya ada”. Dalam buku ini diungkap berbagai ide yang menyangkut masalah penataan ruang perkotaan, mulai dari skala makro yang menyangkut skala perencanaan, yang bersifat 2 dimensi, sampai dengan skala mikro yang menyangkut perencanaan perkotaan (urban desain) yang bersifat 3 dimensi:

Dalam bab 1 antara lain mengemukakan tentang keterkaitan antara tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup perkotaan, adanya kecenderungan pelecehan dan penjurungkirbalikan rencana kota, pemikiran mengenai tindak lanjut pembenahan kota sesudah periode digalakkannya adipura, pembahasan perkara ruang publik dan penghijauan kota serta pemikiran aktual mengantisipasi perkembangan perkotaan di masa depan dalam era globalisasi. **(Mutri)**

Judul Buku : Penataan Ruang dan
Pembangunan Perkotaan
Pengarang : Eko Budihardjo
Penerbit : Alumni
Tahun Terbit : 2011
Jumlah Halaman : 230 halaman

“ Para ilmuwan, pakar dan professional dalam bidang perencanaan, pelaksana, pengawasan, dan pengelolaan perkotaan (secara ringkas dapat dirangkum dalam pengertian “*urban management*”), ditantang untuk memikirkan upaya membenahi centang perenang perkotaan di Indonesia. ”



Istilah Tentang Ruang

Ruang adalah sebuah entitas yang perlu ditata. Mengapa? Karena ruang sifatnya terbatas dan jumlahnya relatif tetap, sedangkan jumlah manusia dan aktivitasnya berkembang pesat. Jika kebutuhan akan ruang terus meningkat tanpa ada pengaturan, maka akan membahayakan ekosistem. Seiring berkembangnya kebutuhan, ruang akan berubah dari yang alamiah menjadi kawasan pertanian, bangunan, pemukiman, dan tempat usaha. Demikian juga wilayah perkotaan, akan terus dipadati bangunan, permukaan diperkeras baik dengan atap bangunan maupun pekarangan, berkesan sumpek, dan ruang terbuka hijau terus menyempit atau bahkan menghilang. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan regulasi terkait penataan ruang yang tertuang dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berikut ini adalah beberapa istilah tentang ruang yang perlu kita ketahui:

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Sumber:
UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang



Tantangan Pekerjaan Menjadi Sesuatu yang Menyenangkan

Ir. Iwan Nurwanto, M.Soc.Sci

Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur, BPIW

Kementerian PUPR melalui BPIW telah melaksanakan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg), Maret lalu. Salah satu tujuan dari kegiatan yang digelar di 4 kota ini adalah konsolidasi program 2018 antara Kementerian PUPR dengan pemerintah daerah melalui dinas bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor. Meski baru dilantik 3 Maret lalu sebagai Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur, Ir. Iwan Nurwanto, M.Soc.Sci sudah langsung bekerja mempersiapkan Pra Konreg. Namun baginya tantangan tersebut justru menjadi

sesuatu yang menyenangkan untuk dikerjakan. Selain Pra Konreg, beberapa hal yang ditargetkan Iwan untuk dilakukan seperti mereview capaian-capaian yang sudah raih. Tidak hanya itu, terobosan baru juga sedang dikerjakan Iwan bersama jajarannya yakni melakukan pendekatan sinkronisasi dan keterpaduan yang berbasis Informasi Teknologi atau IT. Kepada Buletin Sinergi, Iwan Nurwanto membeberkan berbagai hal terkait tugas yang dibebankan kepadanya. Berikut rangkuman wawancaranya.

Setelah sejak 3 Maret lalu menjabat sebagai Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR di BPIW, tantangan apa yang Bapak rasakan terkait tugas di pusat ini bila dibandingkan jabatan sebelumnya?

Dari sisi tugas dan tanggung jawab, pemrograman bukan barang baru buat saya, tapi di BPIW ini cakupannya berbeda, bila dibandingkan saat saya bertugas di bagian program pada Ditjen Pembiayaan Perumahan maupun saat saya bertugas di pemrograman di Ditjen Cipta Karya. Kalau di BPIW cakupannya lebih luas lagi, karena mencakup semua program infrastruktur ke PUPRan, dan itu tantangan yang menarik buat saya.

Dari sisi *stakeholder* atau pemangku kepentingan juga berbeda, dimana 17 tahun saya di pembiayaan perumahan *stakeholdernya* lebih banyak ke pembiayaan perumahan, seperti perbankan, koperasi, ada mitra-mitra pembiayaan yang lain. *Stakeholder* daerah juga ada, tapi porsinya tidak besar. Sedangkan di BPIW, *stakeholdernya* unit organisasi atau unor baik di pusat maupun daerah dan juga pemerintah daerah.

Saya bersyukur, begitu saya bergabung di BPIW, saya langsung terlibat di Pra Konreg selama 1 bulan. Hal itu buat saya, bukan beban, tapi menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tidak semudah itu saya memahami sistem yang sudah berjalan. Namun dengan bantuan Pak Harris, kepala pusat 2 yang lama, Alhamdulillah semuanya dapat saya jalani dengan baik. Apalagi sambutan dari unor-unor cukup menyenangkan. Saya senang mendapat tanggung jawab ini. Dengan tugas baru ini, saya bisa tahu tantangan yang harus dilakukan sektor lain seperti Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Perumahan

Bagaimana Bapak menghadapi tantangan tersebut?

Pertama tentunya, dalam waktu yang singkat saya akan mempelajari sektor-sektor tersebut. Selain itu, saya juga bersyukur dapat bekerja dalam tim yang

merupakan para ahli yang berpengalaman dalam hal pemrograman dan evaluasi. Tentunya, saya tidak dapat bekerja sendiri, namun saya yakin dengan dukungan tim yang solid, berbagai tantangan akan lebih mudah dihadapi.

Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai panitia penyelenggaraan Pra Konreg Maret lalu. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hasil yang didapat dari pelaksanaan Pra Konreg tersebut?

Beberapa hari setelah saya dilantik, saya harus langsung terlibat dalam penyelenggaraan Pra Konreg. Berkat Pak Harris juga, penyelenggaraan Pra Konreg tersebut secara umum berlangsung lancar dan sukses. Hasil Pra Konreg menurut saya, telah cukup menunjukkan keterpaduan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah baik antarsektor, antarwilayah maupun antar tingkat pemerintahan. Hasil kesepakatan Pra Konreg tersebut akan kita tindaklanjuti pada proses-proses selanjutnya di Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Sepanjang Pra Konreg, bagaimana Bapak menilai keterpaduan antar instansi baik pusat maupun daerah?

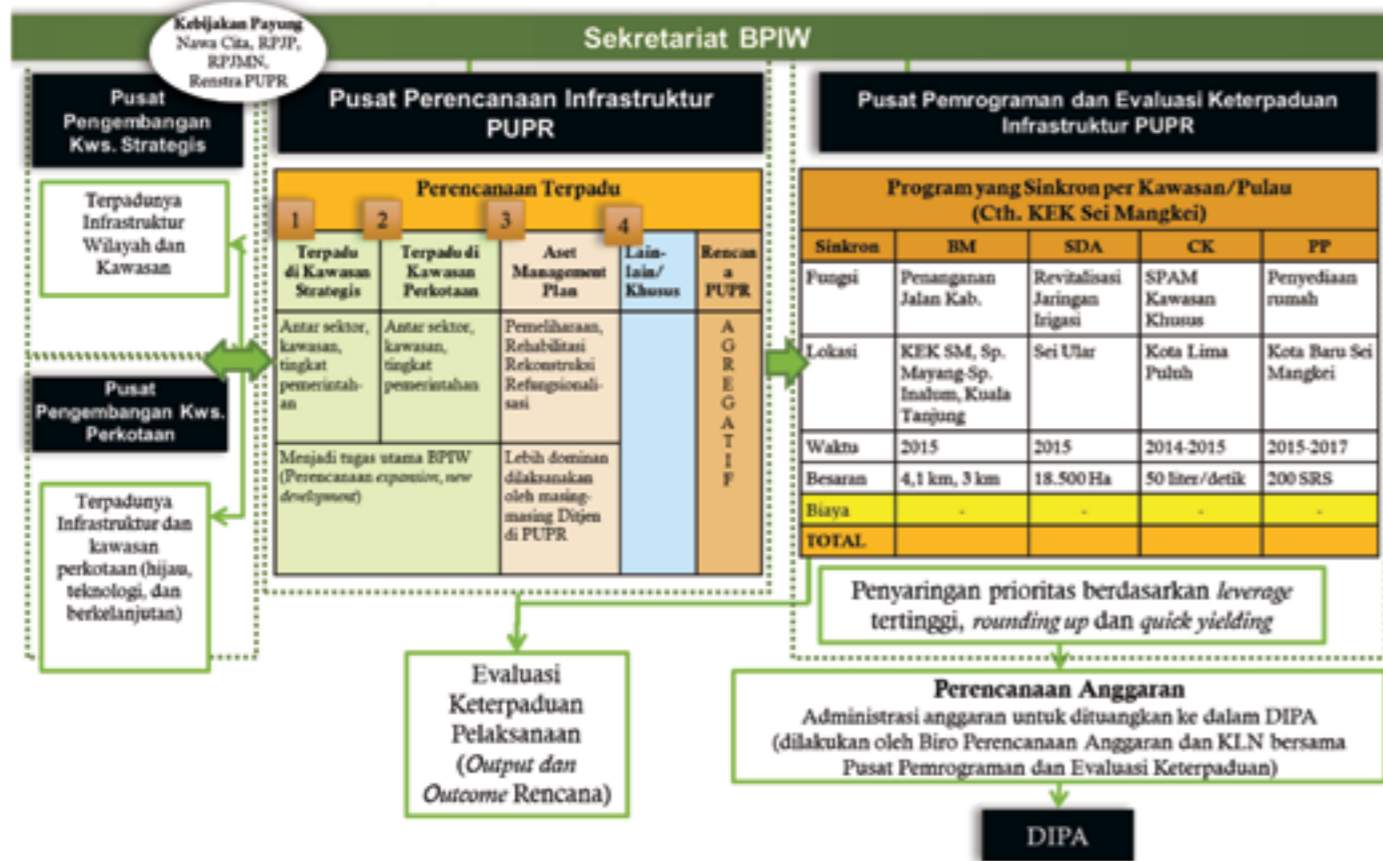
Saya belum bisa membandingkan pelaksanaan Pra Konreg tahun ini dengan yang tahun 2016, karena pada waktu itu saya belum terlibat. Namun dari apa yang disampaikan teman-teman Eselon 2 di BPIW, bahwa pelaksanaan Pra Konreg tahun ini jauh lebih baik dari sebelumnya.

Untuk pelaksanaan 4 kali Pra Konreg yang saya ikuti tahun ini, saya melihat komunikasi dan kerjasama antar instansi baik pusat maupun daerah sudah cukup baik. Tiap-tiap instansi mengetahui perannya masing-masing dan berkeinginan untuk menterpadukan pembangunan infrastruktur dalam rangka pengembangan wilayah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Meski begitu, ada



Saya bersyukur, begitu saya bergabung di BPIW, saya langsung terlibat di Pra Konreg selama 1 bulan. Hal itu buat saya, bukan beban, tapi menjadi sesuatu yang menyenangkan.

BISNIS PROSES BPIW



beberapa hal yang masih perlu di sinkronkan, Disitulah peran kita, BPIW sebagai motor penggerak keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR.

Setelah pelaksanaan Pra Konreg akan dilaksanakan Konsultasi Regional atau Konreg. Seperti apa persiapan yang akan dilakukan?

Pada 26 April dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas. Sebelum itu telah dilaksanakan Musrenbang tingkat provinsi atau Musrenbangprov. Pada musrenbang ini menjadi bahan penajaman pemerintah daerah untuk dibawah ke Musrenbangnas. Pemerintah provinsi di beberapa daerah, mengundang kita kembali sebagai narasumber. Disitu kita menyampaikan kebijakan kita terkait pembangunan infrastruktur PUPR, dan kita juga menyampaikan hasil kebijakan dari pelaksanaan Pra Konreg.

Nanti diakhir bulan Juni atau Juli akan digelar Konreg, dan Konreg digelar setelah keluarnya pagu indikatif dari Kementerian Keuangan. Pada Konreg yang akan dilaksanakan BPIW bersama Biro PKLN ini akan dilakukan penajaman program pembangunan infrastruktur.

Apa hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Konreg tersebut?

Kita semua berharap bahwa program-program pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran 2018 yang dihasilkan dari Konreg betul-betul merupakan program yang terpadu dan dapat memenuhi target kita bersama serta bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, saya juga berharap konsep keterpaduan pembangunan yang sudah kita praktikkan dalam Pra

Konreg dan Konreg dapat diadopsi oleh pemerintah daerah ataupun instansi lain.

Pusat Pemrograman dan Evaluasi Kinerja Infrastruktur PUPR juga akan melakukan Penyusunan Program Jangka Pendek Tahun 2017. Bisa dijelaskan, apa tujuan dari penyusunan program jangka pendek tersebut?

Sebelumnya, mungkin perlu saya jelaskan Pola Kerja Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan yang dihasilkan oleh Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR atau Pusat 2. Pertama, *Masterplan* dan *Development Plan* atau MPDP yang sudah disiapkan oleh seluruh pusat di BPIW akan disarikan menjadi Program Jangka Menengah oleh Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR atau Pusat 1. Selanjutnya, Program Jangka Menengah tersebut, oleh bidang penyusunan program akan disusun menjadi Program Jangka Pendek Keterpaduan Pengembangan Kawasan dan Infrastruktur atau Program 3 Tahunan.

Dalam rumusan Program Jangka Pendek tersebut, dilaksanakan analisis kelayakan dan kriteria program dari segi fungsi, lokasi, waktu, besaran, dana, dan kewenangan. Selanjutnya, dari Program Jangka Pendek tersebut akan disusun menjadi 3 bentuk dokumen sesuai kewenangannya. Pertama, sinkronisasi program tahunan yang sering kita sebut dengan program arahan pengembangan wilayah yang akan dibahas dalam Pra Konreg.

Dokumen kedua, sinkronisasi program tahunan yang akan dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus atau DAK sebagai masukan kepada pemerintah daerah pada konsultasi Program DAK yang di selenggarakan oleh

Bagian Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur Daerah atau FPID Biro PAKLN. Dokumen ketiga adalah matriks program KPBU infrastruktur PUPR yang akan kita koordinasikan dengan simpul-simpul KPBU PUPR seperti DJBK, BPJT, dan BPPSPAM.

Langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam penyusunan program itu?

Dalam rangka penyusunan Program Tahunan, pertama kita menyusun apa yang sering kita sebut Program Arahan Pengembangan Wilayah yang berasal dari kajian *masterplan* dan *development plan* teman-teman di Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR atau Pusat 1, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis atau Pusat 3, dan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan atau Pusat 4. Selanjutnya, program-program tersebut ditajamkan dalam program jangka pendek dan program tahunan.

Program tahunan ini dibahas dalam Pra Konreg dan difinalkan dalam Konreg. Kemudian, program-program hasil Konreg diproses pada rangkaian siklus pemrograman Bappenas hingga menjadi Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga yang merupakan bagian dari Perpres RKP. Proses dari hasil Konreg dikoordinir oleh Biro PAKLN. Disitulah proses pemrograman berakhir dan proses penganggaran dimulai hingga menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA PUPR yang merupakan bagian dari APBN.

Apa pekerjaan rumah di Pusat 2 atau mungkin program baru yang akan dilaksanakan di tahun ini?

Yang jelas kita selalu mereview capaian-capaian yang kita raih dan kita akan terus melakukan penajaman. Kemudian yang agak baru adalah pendekatan sinkronisasi dan keterpaduan yang berbasis Informasi Teknologi atau IT. Itu yang akan kita *launching* tahun ini. Hal itu dilakukan untuk menghindari tumpang tindih kegiatan.

Jadi penyusunan program keterpaduan program infrastruktur dilakukan dengan basis teknologi. Itu sarana untuk kepentingan unor dan pemerintah daerah. Intinya pendataan kita lebih tajam dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan cara ini kita akan menuju pemrograman yang lebih efisien.

Kegiatan apa lagi yang ditargetkan dapat diselesaikan hingga akhir tahun 2017?

Selain Pra Konreg, kami juga masih harus mengawal pemrograman baik penyusunan Program Jangka Pendek atau 3 tahunan maupun penyusunan Program Tahunan baik APBN, DAK, maupun KPBU. Kami juga masih harus mengevaluasi keterpaduan dengan menghitung Indeks Keterpaduan, baik dalam Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS maupun kawasan.

Bagaimana dukungan SDM dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada ?

Secara umum, SDM sudah cukup solid dan berpengalaman dalam melaksanakan tugasnya. Secara kuantitas, jumlah SDM kami masih jauh dari cukup. Bisa dibayangkan dengan tugas dan fungsi atau tusi yang begitu luas, jumlah PNS kami hanya 16 orang diluar 13 pejabat eselon. Namun, kami bersyukur mendapat dukungan dari teman-teman non PNS, konsultan dan pegawai honorer. Dari sisi kualitas, saya kira penting untuk dilaksanakan berbagai pelatihan dan diklat untuk meningkatkan kompetensi. Untuk meningkatkan kebersamaan dan kerjasama di Pusat 2, kami rasa perlu dilaksanakan acara yang memupuk kebersamaan.

Apa harapan Bapak dengan segala tugas yang dibebankan pada Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR?

Saya berharap Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan dapat mendukung kinerja unit organisasi dan berperan penting dalam meningkatkannya keterpaduan pengembangan kawasan dan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antarsektor, dan antar tingkat pemerintahan, serta menjadi motor dalam meningkatnya keterpaduan perencanaan pemrograman dan penganggaran. Kita juga dalam sebulan ini sudah dapat surat dari kabupaten maupun kota yang meminta programnya diakomodir. Untuk itu kita harus lihat prioritas programnya, apakah menunjang prioritas nasional, ketahanan pangan, serta prioritas lainnya.

Kita semua berharap bahwa program-program pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran 2018 yang dihasilkan dari Konreg betul-betul merupakan program yang terpadu



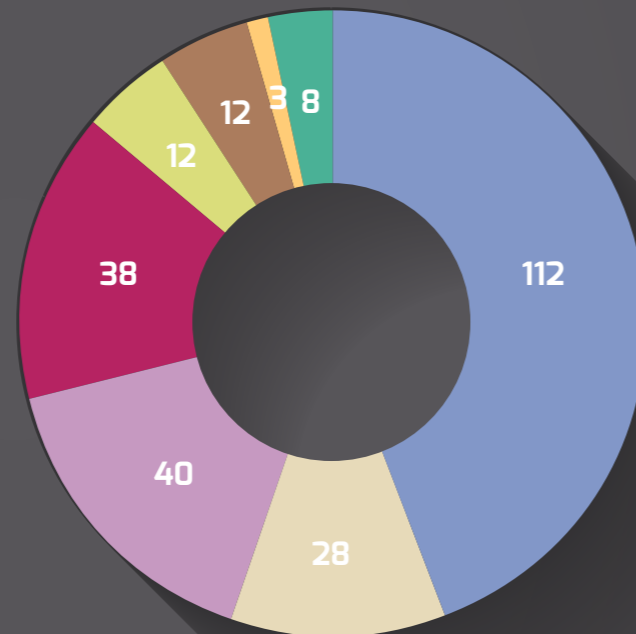
Saya berharap Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan dapat mendukung kinerja unit organisasi dan berperan penting dalam meningkatkannya keterpaduan pengembangan kawasan dan pembangunan infrastruktur PUPR



Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

Kami membuat guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengan hal itu. Guntingan berita kami sarikan dari 6 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Investor Daily, Republika, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu, dapat berguna sebagai media monitoring BPIW. Berikut ini adalah rangkuman pemberitaan mengenai infrastruktur dan yang berkaitan. Selama bulan April 2017. Total ada 253 berita dari 7 media periode 1 April - 30 April 2017.

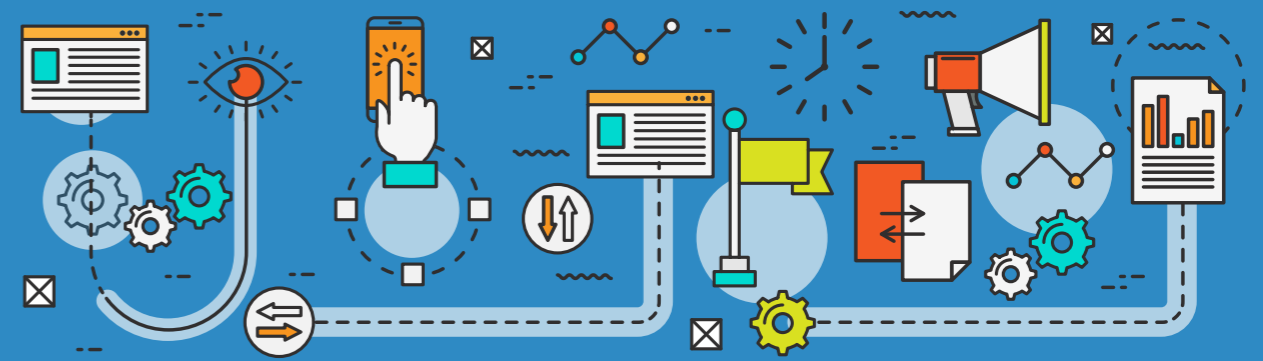
1	Pembangunan Jalan/ jalan tol/jembatan	112
2	pengembangan perkotaan/smart city/ kota pusaka	28
3	Perumahan/Rusun/Permukiman	40
4	Pembiayaan infrastruktur/ anggaran	38
5	Pengelolaan air/ sungai/Bendungan/sanitasi	12
6	Pembebasan lahan/pertanahan	12
7	Pengembangan kawasan pariwisata	3
8	Lain-lain	8



Total: 253



Pemberitaan pada bulan April 2017 totalnya mencapai 253 berita. Berita tersebut didominasi oleh pemberitaan pembangunan jalan tol, serta pembangunan jembatan yang mencapai 112 berita, dimana pemberitaan mengenai Percepatan pengerjaan tol Pejagan – Pemalang lah yang kerap diberitakan oleh Media Massa.



Berita menarik yang berkaitan dengan pengembangan Infrastruktur PUPR, sepanjang bulan April 2017:

- Selasa, 4 April 2017, Bisnis Indonesia** (Halaman, 27)
Kategorisasi Ulang Lebih Tepat Sasaran.
Kementerian PUPR menilai pengkategorian ulang MBR bertujuan supaya program subsidi perumahan dapat lebih tepat sasaran.
- Selasa, 4 April 2017, Bisnis Indonesia** (Halaman, 7)
Pengembalian Dana Talangan Bakal Diteken hari ini.
Kementerian PUPR dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman mengenai pengembalian dana talangan lahan 27 ruas tol pada hari ini.
- Rabu, 5 April 2017, Bisnis Indonesia** (Halaman, 27)
Modal Awal diusulkan Rp 2,5 Triliun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengusulkan agar Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera diberi modal awal Rp 2,5 Triliun dalam anggaran pendapatan belanja negara.
- Rabu, 5 April 2017, Media Indonesia** (Halaman, 19)
Menkeu belum setuju modal awal BP Tapera.
Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan penyerapan modal awal untuk pembentukan BP Tapera sebesar 2,5 Triliun.
- Jumat, 21 April 2017, Koran Tempo** (Halaman, 21)
Pemerintah Promosikan Empat Proyek Waduk ke Cina.
Kementerian PUPR promosikan proyek bendungan saat menerima kunjungan Menteri Sumber Daya Air Cina, Chen Lei di Jakarta
- Jumat, 21 April 2017, Investor Daily** (halaman 22)
Pemerintah dorong KPR bagi Pekerja Informal.
Kementerian PUPR segera meresmikan 10.000 unit hunian di kawasan transit oriented development (TOD) yang ditujukan bagi masyarakat kelas menengah bawah.
- Minggu, 9 April 2017, Kompas** (Halaman, 9)
Berita Foto.
Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau proyek pembangunan jalan tol Bawen – Salatiga di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
- Senin, 10 April 2017, Koran Tempo** (Halaman, 20)
Jalan tol Akses Tanjung Priok Siap Pakai.
Kementerian PUPR telah menyelesaikan jalan tol akses priok.
- Rabu, 12 April 2017, Bisnis Indonesia** (Halaman, 27)
Dharmasraya bangun rusunawa.
Kementerian PUPR memberi bantuan kepada pemerintahan kabupaten dharmasraya, untuk pembangunan rusunawa.
- Selasa, 11 April 2017, Bisnis Indonesia** (Halaman, 7)
Banjir Bandang
Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran 800 miliar untuk penuntasan banjir di kawasan bandung selatan

Kementerian PUPR Siapkan Dukungan Infrastruktur Tiga Kabupaten di Provinsi Aceh

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan sejumlah program dukungan pembangunan infrastruktur untuk tiga kabupaten di Provinsi Aceh, yakni Aceh Besar, Bireun dan Gayo Luwes.

Perencanaan program infrastruktur tersebut juga merupakan bagian dari

Perencanaan program infrastruktur tersebut juga merupakan bagian dari *Grand Design Alternative Development*. Program ini difokuskan pada terobosan tanggap darurat narkoba nasional

Grand Design Alternatif Development. Program ini difokuskan pada terobosan tanggap darurat narkoba nasional yang menysar pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kementerian PUPR salah satu instansi pemerintah yang turut ikut serta pada program yang dicanangkan Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut.

Saat memberikan paparan pada rapat kerja implementasi *Grand Design Alternatif Development* itu di Kota Banda Aceh, Kamis (6/4), Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menjelaskan beberapa program pembangunan infrastruktur.

Dikatakannya untuk Kabupaten Aceh Besar sektor PUPR akan mendukung pengembangan industri berbasis sumber daya alam lokal diantaranya industri peternakan sapi, pertanian kopi, dan coklat. Kementerian PUPR juga akan mendukung pengembangan industri pariwisata dan olahraga alam di Kabupaten



Rido Matari sedang menyampaikan paparan

Sumber: Dok. BPIW

Bireun. Sedangkan di Kabupaten Gayo Luwes, menurut Rido dukungan instansinya terkait pengembangan lahan tanaman ganja menjadi areal pertanian lainnya.

Pada kesempatan itu Rido juga menyampaikan bahwa Kementerian PUPR memiliki beberapa strategi pengembangan wilayah di Kota Banda Aceh, diantaranya strategi pengembangan wilayah 1 dan strategi pengembangan wilayah 2.

Menurut Rido strategi pengembangan wilayah 1 adalah mengembangkan kegiatan industri berbasis sumber daya alam lokal dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kesesuaian dengan tata ruang daerah. Kemudian, strategi pengembangan wilayah 2 mendukung pengembangan kawasan wisata di Provinsi Aceh untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Rapat Kerja tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

(Dayamas) Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Drs. Sobri Effendy Surya, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTU) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kegiatan tersebut juga dihadiri Direktur Konservasi Tanah dan Air (KTA)

“Sampai saat ini pengerjaan yang dilakukan sudah mencapai 80 persen. Jembatan ini merupakan duplikasi dari jembatan yang ada sebelumnya,”

Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, M. Firman.

Selain memberikan paparan, Rido juga melakukan kunjungan pembangunan Infrastruktur Jembatan Kruncut dan fly over simpang Surabaya di Aceh.

Tempat dibangunnya jembatan Kruncut ini merupakan lokasi sudetan tahun 1992 yang dulunya dibangun oleh Ditjen Pengairan untuk perbaikan konektivitas. “Sampai saat ini pengerjaan yang dilakukan sudah mencapai 80 persen. Jembatan ini merupakan duplikasi dari jembatan yang ada sebelumnya,” ungkap Rido. Untuk pembangunan fly over simpang Surabaya di kota Banda Aceh ditargetkan selesai dibangun Bulan November 2017. **Ind/infobpiw**

Kementerian PUPR Arahkan RKPD Jambi Mendukung Pencapaian Sasaran Nasional

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2017 di Jambi, Selasa (5/4). Musrenbang yang mengambil tema “Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Dalam Rangka Percepatan Menuju Jambi Tuntas 2021” ini digelar untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jambi 2018.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional KPPN/Bapenas, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi dan DPD RI Utusan Provinsi Jambi.

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dadang Rukmana menyatakan, Kementerian PUPR mendorong agar Pemprov Jambi dapat memiliki RKPD 2018 yang menunjang sasaran strategis nasional.

Ia menjelaskan, saat ini kebutuhan anggaran untuk infrastruktur nasional mencapai sekitar Rp 2.200 Triliun, namun kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Usai pembahasan Musrenbang

Sumber: Dok BPIW

(APBN) mencapai 1.250 Triliun. “Sehingga, alokasi kegiatan pembangunan mesti dipilih untuk yang super prioritas,” terangnya.

Menurutnya, kegiatan super prioritas tersebut yang menunjang keberhasilan visi dan misi pemerintah. “Dimana pembangunan infrastruktur yang dilakukan

harus mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi berkualitas dalam hal terbentuknya konektivitas antar wilayah dan daerah,” terangnya. Kemudian, menjamin berkurangnya disparitas, menjamin ketahanan pangan dan energi serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dadang menjelaskan, pola pengembangan yang dilakukan Kementerian PUPR saat ini berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Provinsi Jambi sendiri termasuk pada WPS 5, yakni Jambi – Palembang – Pangkal Pinang – Tanjung Pandan. Pengembangan infrastruktur di WPS 5, Dadang mencontohkan, pada 2018 ada Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Kuala Tungkal, Pembangunan Fly Over (Simpang

di Jambi kedepan, baik dalam perspektif pembangunan daerah maupun perspektif

“Peningkatan infrastruktur guna mendukung pembangunan di semua sektor, terutama guna meningkatkan pelayanan dasar di Provinsi Jambi,”

pembangunan nasional. Ia berharap, kegiatan duduk bersama dengan semua stakeholder

Menurutnya, dalam penyusunan RKPD 2018 Pemprov Jambi mengambil tema “Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Dalam Rangka Percepatan Menuju Jambi Tuntas 2021”.

“Tema ini secara implisit memberikan gambaran fokus program dan kegiatan serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi pada tahun 2018. Adapun isu yang diangkat sesuai dengan tema tersebut, adalah peningkatan infrastruktur guna mendukung pembangunan di semua sektor, terutama guna meningkatkan pelayanan dasar di Provinsi Jambi. Hal tersebut telah tercantum dalam rancangan prioritas pembangunan Provinsi Jambi tahun 2018,” terangnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, ia berharap, kehadiran unsur Kementerian terkait dapat membantu Pemprov Jambi dalam mewujudkan melakukan percepatan pembangunan dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan kepada masyarakat. **(ris/infoBPIW)**

Keramasan), Pembangunan jembatan Jembatan Musi. “Kemudian Penyusunan RTBL Destinasi Wisata Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung,” terangnya. Sementara itu, H. Zumi Zola Zulkifli mengatakan, Musrenbang memiliki makna strategis bagi pelaksanaan pembangunan

pembangunan ini memberi arti pada masa depan pembangunan Provinsi Jambi di tahun 2018. “Mudah-mudahan melalui pertemuan hari ini, dapat mensinergikan dan memadukan derap langkah pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2018 nantinya,” terangnya.

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan Butuh Kerjasama Lintas Daerah

Kota memiliki fungsi internal dan eksternal. Selain dituntut untuk dapat menyediakan infrastruktur dasar bagi masyarakat, sebuah kota juga dituntut untuk memenuhi fungsi eksternal untuk dapat melayani kebutuhan kota-kota di sekitarnya yang memiliki hierarki lebih kecil, sehingga perlu kerjasama lintas daerah,

Dalam empat dekade ini, populasi penduduk perkotaan meningkat 6 kali lipat, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan perkotaan seperti *backlog* perumahan, timbulnya permukiman kumuh, banjir, kemacetan, meningkatnya kriminalitas serta disparitas yang semakin tinggi. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dibutuhkan kerjasama yang kuat antar sektor, antar daerah, dan antar tingkat pemerintahan. Demikian disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga, saat menjadi narasumber pada acara *Focus Group Discussion (FGD)* dalam Rangka

Identifikasi Kota dalam Pengendalian dan Pengelolaan Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), di Yogyakarta, (11/4).
 "Kota memiliki fungsi internal dan eksternal. Selain dituntut untuk dapat menyediakan infrastruktur dasar bagi masyarakat, sebuah kota juga dituntut untuk memenuhi fungsi eksternal untuk dapat melayani kebutuhan kota-kota di sekitarnya yang memiliki hierarki lebih kecil, sehingga perlu kerjasama lintas daerah," tutur Agusta.
 "Kementerian PUPR telah menerbitkan beberapa Peraturan Menteri yang memuat standar pelayanan minimal, dan pedoman pengelolaan infrastruktur PUPR, sehingga dapat digunakan sebagai input dalam menyusun Standar Pelayanan Perkotaan," tambahnya.
 Kegiatan yang diadakan Direktorat Jenderal



Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri ini bertujuan menjangkau aspirasi daerah terkait dengan Pengendalian dan Pengelolaan Standar Pelayanan Perkotaan, sehingga dapat mendorong strategi dan kebijakan pembangunan perkotaan yang berdaya saing dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan RPJMN 2015-2019.
 Kegiatan yang diadakan 10-12 April tersebut dibuka oleh Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Budiono Subambang. Saat membuka acara tersebut, Budiono menyatakan bahwa dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah bidang Perkotaan, selain mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Pemerintah Daerah juga harus mempertimbangkan Standar Pelayanan

Perkotaan (SPP) dalam mendukung kebijakan Nasional dengan memperkuat Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (SPP) dalam mendukung pelayanan berdasarkan jumlah penduduk, sedangkan SPP mempertimbangkan fungsi, dan peran kota, sehingga tidak hanya berdasar pada banyaknya penduduk yang harus dilayani pada sebuah kota," ungkapnya.
 Penyusunan Standar Pelayanan Perkotaan menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan perkotaan sebagai ukuran capaian penyediaan infrastruktur dengan pengukurannya sesuai klasifikasi dan tipologi perkotaan.
 Acara yang dihadiri beberapa Bappeda dari kabupaten maupun kota ini, juga menghadirkan beberapa narasumber, seperti Hayu Parasati dari Kementerian PPN/ Bappenas, Agus Sutanto dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Ir. Bambang
 sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 "SPP memiliki perbedaan dengan SPM, karena SPM menyediakan infrastruktur

Penyusunan Standar Pelayanan Perkotaan menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan perkotaan sebagai ukuran capaian penyediaan infrastruktur

Perkotaan (SPP) dalam mendukung pelayanan berdasarkan jumlah penduduk, sedangkan SPP mempertimbangkan fungsi, dan peran kota, sehingga tidak hanya berdasar pada banyaknya penduduk yang harus dilayani pada sebuah kota," ungkapnya.
 Penyusunan Standar Pelayanan Perkotaan menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan perkotaan sebagai ukuran capaian penyediaan infrastruktur dengan pengukurannya sesuai klasifikasi dan tipologi perkotaan.
 Acara yang dihadiri beberapa Bappeda dari kabupaten maupun kota ini, juga menghadirkan beberapa narasumber, seperti Hayu Parasati dari Kementerian PPN/ Bappenas, Agus Sutanto dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Ir. Bambang

BPIW Lakukan Review Renstra Kementerian PUPR 2015-2019

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan review Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2015-2019.

Kepala BPIW yang juga selaku Ketua Tim Pengarah Review Renstra, Rido Matari Ichwan mengatakan, perkembangan dinamika yang ada saat ini mendorong untuk melakukan review terhadap Renstra Kementerian PUPR 2015-2019.

Tujuan agar keberadaan Renstra Kementerian PUPR dapat menjadi arah kebijakan program, kegiatan serta pendanaan yang efektif, dan mampu merespon dinamika pembangunan yang ada

"Tujuan agar keberadaan Renstra Kementerian PUPR dapat menjadi arah kebijakan program, kegiatan serta pendanaan yang efektif, dan mampu merespon dinamika pembangunan yang ada," papar

Rido saat menyampaikan arahan kebijakan dalam *Kick Off Meeting Midterm Review Renstra PUPR* di Jakarta, Kamis (20/4).

Rido menerangkan, sejumlah perkembangan dinamika yang mengalami perubahan, antara lain lingkungan strategis, isu strategis serta kinerja 2015-2016 dan asumsi pendanaan.

Penelaahan RKAK/L (ADIK) serta PermenPAN dan RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP turunan Perpres No. 29 Tahun 2014.

Rido mengatakan, dari dinamika isu strategis muncul dorongan agar ada penataan kelembagaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. "Termasuk penyesuaian terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerangka regulasi serta isu kesetaraan gender," terangnya.

Kemudian, ungkap Rido, dari dinamika kinerja 2015-2016 dan asumsi pendanaan diperlukan berbagai penyesuaian-penyesuaian. Seperti pada target dan realisasi kinerja, target dan realisasi pendanaan, kendala dan permasalahan

Tim Pengarah Review Renstra, Prof. Anita Firmanti mengatakan, kegiatan review untuk melahirkan Renstra PUPR yang terjamin efektifitasnya dan mampu merespon dinamika pembangunan.

Termasuk penyesuaian terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerangka regulasi serta isu kesetaraan gender

Kegiatan *Kick Off Meeting Review Renstra PUPR* ini dihadiri seluruh perwakilan unsur di lingkungan Kementerian PUPR. Pada Juli mendatang ditargetkan telah lahir *Midterm review Renstra PUPR 2015-2019*. ([ris/infoPUPR](#))

Renstra PUPR memiliki posisi strategis dalam arah Kementerian PUPR ke depan.



Prof. Anita Firmanti memberikan pengarahan

"Untuk lingkungan strategis, misalnya ada perubahan arah kebijakan terkait prioritas nasional yang tercantum dalam Perpres No. 3 Tahun 2016, PP No. 13 Tahun 2017, Direktif Presiden dan lainnya," terangnya.

Selain itu, ada juga aturan PMK No.136 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan

realisasi investasi infrastruktur PUPR 2015 dan 2017, realisasi investasi infrastruktur PUPR 2015 dan 2016 serta proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur PUPR 2017, 2018, dan 2019.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR yang juga Wakil Ketua

Sehingga, kegiatan tersebut diharapkan dapat melahirkan Renstra PUPR yang efektif dan mampu merespon dinamika pembangunan.

Anita berharap, kerja keras BPIW yang didukung unsur di lingkungan Kementerian PUPR akan mampu menjawab tantangan

Sumber: Dok. BPIW

Kementerian PUPR Dukung Akselerasi Pengembangan Infrastruktur di Riau



Sumber: Dok. BPIW

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendukung upaya akselerasi pengembangan infrastruktur di Provinsi Riau, sehingga diharapkan dapat mewujudkan peningkatan daya saing di wilayah tersebut.

Hal itu ditegaskan Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana saat mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam seminar pembangunan nasional "Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Daya Saing Riau," di Balai Serimbit, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (19/4).

Hadir pembicara lain dalam seminar nasional tersebut, Pakar Sosiologi Pendidikan yang juga Rektor Universitas Sebelas Maret, Prof. Ravik Karsidi.

Dadang menerangkan, melakukan akselerasi pengembangan infrastruktur pada hakekatnya merupakan upaya membangun masyarakat dan negara. Peralannya, untuk mencapai masyarakat dan negara yang maju senantiasa memerlukan infrastruktur yang memadai.

Dengan begitu, lanjutnya, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR dalam menunjang sasaran nasional, antara lain meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi. "Tujuannya agar dapat menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi," paparnya.

Kemudian memberikan dukungan konektivitas nasional, guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global.

Ada juga memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas dan permukiman di perkotaan dan perdesaan serta meningkatkan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan.

Lebih lanjut Dadang menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR dalam melakukan pengembangan infrastruktur menerapkan metode berbasis kewilayahan atau Wilayah

Pengembangan Strategis (WPS). "Seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya terkelompokan dalam 35 WPS," jelas Dadang.

Provinsi Riau sendiri, ungkapnya, masuk dalam WPS 2, yakni WPS Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru. "Salah satu harapan dari penerapan WPS ini adalah mendapatkan titik-titik akupunktur wilayah, sehingga saat titik tertentu itu disentuh pengembangan infrastruktur akan memberi efek berantai pada pengembangan di wilayah-wilayah sekitarnya," jelas Dadang.

Terlebih, diakui Dadang, saat ini masih ada keterbatasan kapasitas keuangan negara dalam membiayai belanja infrastruktur. Sehingga, salah satu strateginya dalam pengembangan infrastruktur dilakukan skala prioritas.

Dipaparkan juga, dalam pengembangan infrastruktur di Riau pada 2018 yang telah terdokumentasi dalam *Masterplan* dan *Development Plan* (MPDP) WPS 2, antara lain pembangunan pengamanan tebing Sungai Kampar Kanan di Kabupaten.

"Kemudian pembangunan prasarana pengendalian banjir Sungai Kampar Kiri di Kabupaten Kampar," ujarnya.

Ada juga, ujar Dadang, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional-jaringan distribusi utama dari Tanjung Melawan, Rokan Hilir hingga Simpang Bangko. "Pembangunan SPAM untuk kawasan di Kota Dumai, Kab. Rokan Hilir dan Kab. Bengkalis dengan kapasitas 2000 liter/detik," terangnya.

Selain itu, ada juga pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terpusat di Pekanbaru. "Serta ada pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) di Kabupaten Rokan Hilir," paparnya.

Dalam bidang perumahan ada, pembangunan rumah umum di Kota Pekanbaru, pembangunan baru rumah khusus TNI/Polri di Kota Pekanbaru. "Kemudian ada juga pembangunan rumah khusus yang dialokasikan untuk nelayan di Kota Dumai," terangnya. Selain itu, ada juga

pelebaran jalan batas Kampar-Bangkinang, pelebaran jalan Jalan Subrantas-Kampar. "Pelebaran Jalan Jalan Siak II di Pekanbaru," ujarnya.

perdagangan multilateral.

"Dampak dari globalisasi itu memang ada peluang termasuk ancaman. Untuk itu, bangsa kita ini perlu mendapat dasar pendidikan yang kuat, agar dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya dan meminimalisir ancaman atau dampak negatif dari globalisasi," ungkap Ravik. Ia yakin, banyaknya peluang dari globalisasi yang dimanfaatkan akan turut meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat.

Seminar yang dibuka langsung Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman ini, dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Ahmad Hijazi, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, perwakilan DPRD provinsi/kota, asosiasi penyedia jasa konstruksi dan jajaran civitas serta ikatan alumni Universitas Riau. (ris/infoBPIW)

Dampak dari globalisasi itu memang ada peluang termasuk ancaman. Untuk itu, bangsa kita ini perlu mendapat dasar pendidikan yang kuat, agar dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya

Sementara itu, Prof. Ravik Karsidi memaparkan, saat ini era globalisasi sudah tidak dapat dihindari lagi. Sebab, sejak 1995 Indonesia telah menjadi anggota WTO dan ikut meratifikasi semua perjanjian-perjanjian

BPIW Gelar Sosialisasi dan Diskusi Undang-Undang Jasa Konstruksi



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Sosialisasi dan Diskusi Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK) di Jakarta, Senin (10/4).

Sosialisasi yang dihadiri jajaran pejabat dan staf di lingkungan BPIW ini menghadirkan nara sumber, Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR, Dr. Ir. Darda Daraba, MS.i.

Kepala BPIW, Ridho Matari Ichwan, saat membuka acara Sosialisasi dan Diskusi UUJK mengatakan, acara tersebut digelar

agar insan BPIW semakin paham terhadap peraturan perundang-undangan khususnya bidang ke-PU-an.

Hadirnya pemahaman tersebut, ujar Ridho, dapat memberikan peningkatan kompetensi dan kinerja pelayanan publik.

"Tentunya dalam menjalankan tugas kita untuk memastikan pembangunan jalan, waduk, sanitasi, air minum, sarana persampahan, rumah susun, dan infrastruktur PUPR lainnya berjalan secara terpadu dan sinergi sesuai dengan arahan rencana induk (*masterplan*) dan rencana pengembangan (*development plant*)

infrastruktur wilayah," paparnya.

Keberadaan UUJK, ungkap Ridho juga, dapat mendukung lahirnya sumber daya manusia (SDM) konstruksi dan produk infrastruktur yang semakin berkualitas, sehingga dapat secara efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Darda Daraba mengatakan, Sosialisasi UU Nomor 2 Tahun 2017 yang digelar BPIW merupakan kegiatan pertama kali yang digelar Unit Organisasi (Unor) di lingkungan Kementerian PUPR. "Saya mengapresiasi jajaran BPIW yang cepat dan tanggap dalam upaya mendukung

LATAR BELAKANG UU NO 2 Tahun 2017 JASA KONSTRUKSI



tersosialisasikannya UUJK kepada masyarakat dunia konstruksi" terangnya.

Menurutnya, mencakup UUJK antara lain, adanya pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. "UUJK memberikan amanat agar ada pembagian tugas dan wewenang kepada pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan pengembangan infrastruktur yang sesuai arahan *masterplan* dan *development plant*," terangnya.

Ia menjelaskan, sesuai UUJK pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha jasa konstruksi nasional, terselenggaranya jasa konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan.

"Pemerintah pusat juga wajib meningkatkan kompetensi, profesionalitas dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat jasa konstruksi," ungkapnya.

Untuk pemerintah provinsi, lanjutnya, memiliki tanggung jawab dan kewenangan menyelenggarakan pelatihan tenaga konstruksi serta penyelenggaraan system

informasi jasa konstruksi cakupan wilayah provinsi.

"Untuk Kabupaten dan Kota sendiri memiliki wewenang menyelenggarakan pelatihan tenaga konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan wilayah

terkait badan usaha asing, pengaturan proses dalam penyelesaian sengketa yang lebih mengedepankan musyawarah mufakat daripada jalur pengadilan, perbaikan proses penetapan kegagalan bangunan, penguatan tenaga kerja konstruksi dan pengaturan tenaga kerja asing.

Adanya jaminan ketenag-angan bagi kalangan dunia jasa konstruksi dalam bekerja, karena hilangnya ketentuan pidana

kabupaten/kota. Kemudian, penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah dan besar.

Selain itu, lanjutnya, Kota dan Kabupaten memiliki wewenang pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Ada juga, lanjutnya, perbaikan klasifikasi dalam usaha jasa konstruksi, pengaturan

la mengatakan, kemudian penguatan kelembagaan yang mencakup unsur-unsur kelembagaan dan pembiayaan kelembagaan. "Serta adanya jaminan ketenag-angan bagi kalangan dunia jasa konstruksi dalam bekerja, karena hilangnya ketentuan pidana," jelasnya. Sosialisasi UUJK ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi dari peserta. (Tim/infoBPIW)

Bahas RPP Perkotaan, BPIW Gelar Rakor untuk Tampung Sejumlah Masukan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar rapat koordinasi dengan seluruh Unit Organisasi (Unor) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

RPP Perkotaan yang tengah disusun Kemendagri merupakan peraturan bersama untuk memecahkan masalah-masalah perkotaan, baik berkaitan dengan infrastruktur, penataan ruang, perhubungan, dan lain sebagainya

guna mendapat masukan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perkotaan di Jakarta, akhir pekan kemarin. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Agusta Ersada Sinulingga menyampaikan, Kementerian

PUPR memiliki peran yang besar dalam pengelolaan perkotaan, khususnya dalam penyelenggaraan infrastruktur.

"RPP Perkotaan yang tengah disusun Kemendagri merupakan peraturan bersama untuk memecahkan masalah-masalah perkotaan, baik berkaitan dengan infrastruktur, penataan ruang, perhubungan, dan lain sebagainya, sehingga memerlukan masukan, salah satunya dari Kementerian PUPR sebagai kementerian teknis," papar Agusta.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru, Manggas Rudy Siahaan mengatakan, RPP Perkotaan perlu memuat pengaturan pendanaan dan pembiayaan infrastruktur. Pasalnya, ada beberapa perkotaan yang berada pada lintas

6 TANTANGAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN

TATA KELOLA PERKOTAAN
83,6% RTRW Kota telah ditetapkan dalam Perda

IMB belum dimanfaatkan secara optimal sebagai Instrumen kontrol land use



Desentralisasi peraturan
 berdasarkan prinsip otonomi daerah

EKONOMI PERKOTAAN

Kesenjangan KBI & KTI:

Kontribusi PDRB terhadap PDB 2015

Kontribusi perkotan terhadap PDRB Nasional **74%**

2011-2014 ICOR (Incremental Capital Output Ratio):

Indonesia 6.7

Singapore, Thailand, Malaysia, Vietnam **3-4**

Sumber: ADB, 2015

The lower the ICOR, the more productive the Capital Investment

Jaringan Infrastruktur Regional mendukung Aliran Barang & Jasa dan Jaringan Infrastruktur dalam Kota

batas administrasi kabupaten/kota bahkan provinsi.

Rudy menambahkan, pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan berpotensi menimbulkan kendala pembiayaan yang disebabkan keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga perlu dikuatkan dengan mekanisme pembiayaan non APBN.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Sugiyantoro sebagai Tim dari Kemendagri. Ia berharap, RPP Perkotaan dapat mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi

Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dalam menyusun rencana pembangunan, agar dapat menentukan pelayanan yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan perkotaan.

Rapat tersebut diselenggarakan dalam rangka koordinasi internal Kementerian PUPR untuk mendapatkan masukan

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan berpotensi menimbulkan kendala pembiayaan yang disebabkan keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

dari masing-masing Unor teknis, guna memperkaya muatan RPP Perkotaan yang tengah disusun Kemendagri. RPP Perkotaan akan menjadi payung hukum

dalam menyelenggarakan pelayanan infrastruktur perkotaan. Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari

masing-masing unor, mulai dari perwakilan Sekretariat Jenderal, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan, serta internal BPIW. (Mikdam/infoBPIW)

PERUMAHAN & PERMUKIMAN

7,6 juta BACKLOG PERUMAHAN TAHUN 2015

67,7%
 Cakupan pelayanan penyediaan air bersih nasional

+ 3,4 Juta Unit Rumah Tidak Layak Huni (2015)

38,000 ha Luas Permukiman Kumuh Program 100 - 0 - 100

56%
 Cakupan pelayanan pengelolaan sampah

Infrastruktur Miliki Peran Strategis dalam Kemajuan Ekonomi

Pengembangan infrastruktur memiliki peran yang sangat strategis dalam kemajuan ekonomi negara. Pasalnya, pada proses pembangunan maupun pasca pembangunan, hanya pengembangan infrastruktur yang memiliki efek berantai. Termasuk, daya ungkit dalam pertumbuhan ekonomi.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan dalam *Ministerial Lecture* yang mengangkat tema "Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Strategi Pembiayaan untuk Percepatan Pembangunannya," di Universitas Islam Bandung (Unisba), Bandung, Sabtu, (22/4).

Untuk itu, lanjutnya, pengembangan infrastruktur yang dilakukan suatu negara pada hakekatnya merupakan upaya nyata membangun ekonomi masyarakat. Sebab, untuk mencapai kemajuan ekonomi senantiasa memerlukan infrastruktur yang memadai.

Rido juga memaparkan, untuk arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR dalam menunjang sasaran nasional, antara lain meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi.

Dalam sasaran pembangunan infrastruktur PUPR 2015-2019, ungkap Rido, sektor sumber daya air ditarget dapat membangun 65 bendungan, penyediaan 67,53 M3/s air baku, 1 juta ha jaringan irigasi baru, 3 juta ha rehabilitasi jaringan irigasi, 530 KM pengamanan pantai dan 3.000 KM pengendali banjir.



Rido Matari Ichwan memberikan pengarahan

Sumber: Dok BPIW

"Harapannya agar pembangunan di sektor sumber daya air, dapat menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi," terangnya

Kemudian, lanjut Rido, pembangunan untuk mendukung konektivitas nasional. Pada sasaran pembangunan infrastruktur PUPR 2015-2019 ditarget terwujud 1.000 KM jalan

tol. "Baik yang dibangun pemerintah maupun swasta," terangnya.

Selain itu, pembangunan 2.650 KM jalan nasional, pembangunan 29.859 M jembatan baru, peningkatan kapasitas jalan nasional 3.073 KM serta peningkatan kualitas jembatan sepanjang 19.953 M. "Hal itu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, pelayanan sistem

logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global," jelas Rido.

Ada juga dukungan terhadap peningkatan kualitas dan permukiman di perkotaan dan perdesaan serta meningkatkan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan.

Dalam mewujudkan sasaran pembangunan infrastruktur PUPR 2015-2019, Rido menerangkan, Kementerian PUPR menerapkan metode berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan

pada pengembangan di wilayah-wilayah sekitarnya.

KPBU merupakan kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko

Rido juga mengakui, saat ini terdapat kesenjangan antara kemampuan dan kebutuhan anggaran pembangunan

infrastruktur dapat dilakukan percepatan.

Salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah, ungkap Rido, pengembangan pembiayaan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). KPBU merupakan kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara kedua para pihak.

Menurutnya, untuk jenis infrastruktur PUPR yang dapat dikerjasamakan dengan skema KPBU, yakni infrastruktur jalan, infrastruktur sumber daya air dan irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat, infrastruktur sistem pengelolaan sampah dan infrastruktur perumahan rakyat.

Di sisi lain, Rido juga mencontohkan, untuk meningkatkan jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mengakses rumah layak huni, pada tahun 2015-2019 Kementerian PUPR melalui Ditjen Pembiayaan Perumahan menyalurkan bantuan pembiayaan pembangunan 1.350.000 unit rumah tangga.

Selain itu, terdapat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang merupakan program pemberian bantuan dan kemudahan perolehan rumah bagi MBR dengan suku bunga rendah 5%, jangka waktu kredit sampai dengan 20 tahun, uang muka ringan, bebas PPN, serta bebas premi asuransi dan asuransi kebakaran.

Ministerial Lecture yang digelar di Aula Utama Unisba ini diikuti ratusan mahasiswa sarjana dan pasca sarjana program Perencanaan Wilayah dan Kota Unisba. Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi mengenai pengembangan infrastruktur dan wilayah di Indonesia. **(ris/infoBPIW)**

Strategis (WPS).

"Dimana seluruh wilayah yang ada di Indonesia, semuanya masuk menjadi terkelompokan dalam 35 WPS," urainya. Ia menjelaskan, penerapan WPS agar pengembangan infrastruktur dapat dilakukan dengan tepat di wilayah strategis, yang dapat memberi efek berantai

infrastruktur PUPR 2015-2019. "Kebutuhan investasi infrastruktur 2015-2019 mencapai Rp 4.796 triliun, namun kemampuan APBN plus APBD mencapai Rp 1.978 triliun," terangnya.

Agar dapat memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur, lanjutnya, diperlukan berbagai inovasi pembiayaan, supaya pengembangan

BPIW Beri Masukan Terkait Kurikulum Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota UNDIP

Kurikulum Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (MPWK), Universitas Diponegoro perlu dimodifikasi untuk mengakomodir kebutuhan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di BPIW. Untuk itu, diperlukan berbagai masukan untuk menyempurnakan kurikulum di program studi tersebut.

Demikian disampaikan Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Dadang Rukmana, saat *Workshop* Pembahasan Kurikulum Program Studi MPWK Universitas Diponegoro untuk Bidang Perencanaan Infrastruktur Wilayah, di Jakarta, (26/4).

Lebih lanjut Dadang menyatakan kerjasama antara UNDIP dengan Kementerian PUPR selama ini menekankan pada kurikulum pada bidang penataan ruang.

Pertemuan yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dari BPIW ini merupakan kelanjutan dari pertemuan dengan Universitas Diponegoro di Yogyakarta, 6 April 2017 lalu. Lebih lanjut Dadang menyatakan kerjasama antara

infrastruktur wilayah melalui perencanaan yang terpadu dan pemrograman yang sinkron. "Untuk mengemban tugas yang ada, SDM yang ada di lingkungan BPIW harus memiliki kompetensi atau mempunyai kemampuan baru, yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan yang ada," ucap Dadang.

Dalam kesempatan itu, Dadang juga menyampaikan beberapa hal, seperti tantangan dalam melaksanakan pembangunan. Mengenai hal ini Dadang menyatakan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi berupa disparitas antar wilayah yang masih tinggi. Selain itu, fenomena urbanisasi yang diikuti dengan masalah-masalah perkotaan,

itu diperlukan Rencana Tata Ruang (RTR) yang menyentuh perencanaan infrastruktur.

Konsep pengembangan kurikulum ini juga ada rambu-rambunya jadi kita tidak bisa sesuka hati. Pengembangan kurikulum ini harus dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Sebagai salah satu badan baru di Kementerian PUPR menurut Dadang, BPIW mengembangkan *tools* dalam menyusun program infrastruktur yang implementatif

ada rambu-rambunya jadi kita tidak bisa sesuka hati. Pengembangan kurikulum ini harus dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Setiap lulusan MPWK harus mampu menguasai teori ataupun proses kerja," tegas Jawoto.

Kegiatan ini dihadiri beberapa kalangan seperti Widyaiswara Utama Kementerian PUPR, Haris Hasudungan Batubara, para Pejabat Eselon III di lingkungan BPIW, dan Dosen MPWK UNDIP, serta staf lainnya. **Vina/infobpiw**



UNDIP dengan Kementerian PUPR selama ini menekankan pada kurikulum pada bidang penataan ruang.

Lebih lanjut Dadang mengatakan BPIW merupakan produk reformasi kelembagaan yang diberi amanat mengembangkan

belum kuatnya konektivitas infrastruktur antar wilayah, dan pemanfaatan sumber daya yang belum optimal.

Dalam melaksanakan pembangunan, menurut Dadang perlu perencanaan yang mencakup struktur dan pola ruang. Untuk

berupa *masterplan* dan *development plan* yang penyusunannya berdasarkan RTR.

Lektor Kepala UNDIP, Jawoto Setyono menambahkan pada tahun ini pihaknya sudah mengevaluasi kurikulum baru. "Konsep pengembangan kurikulum ini juga



Kualitas Kebersihan KSPN Jadi Tantangan Besar

Kualitas kebersihan destinasi wisata sangat erat kaitannya dengan kenyamanan para wisatawan saat berkunjung. Saat ini masalah kebersihan masih menjadi salah satu tantangan besar di 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pasalnya, penanganan persampahannya dinilai masih belum dilakukan dengan optimal.

Sampah memang harus ditangani serius. Terlebih, saat ini pemerintah gencar melakukan pengembangan KSPN sekaligus promosi wisata sampai keluar negeri. Dalam mendukung segala upaya yang dilakukan berdampak positif pada dunia pariwisata, pengelolaan sampah yang optimal sudah menjadi keharusan untuk segera diwujudkan.

Dalam mengelola persampahan di KSPN, Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) komitmen mendukung pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai di KSPN prioritas. Hal itu dalam rangka upaya nyata meningkatkan pengelolaan sampah di KSPN prioritas yang dinilai masih belum optimal.

Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan menilai, untuk meningkatkan pengelolaan sampah di KSPN prioritas diperlukan inovasi dan antisipasi peningkatan volume sampah, agar kebersihan dan keindahan destinasi wisata dapat tetap terpelihara dengan baik.

"Terpeliharanya kebersihan dan keindahan di destinasi wisata, diharapkan dapat mendukung tercapainya target pariwisata nasional berupa jumlah kunjungan turis asing 20 juta di tahun 2019," ungkap Rido saat Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah di 10 KSPN yang dilaksanakan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, beberapa waktu lalu

Saat ini, Kementerian PUPR melakukan pengembangan infrastruktur menerapkan metode yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya terkelompokan pada 35 WPS. Pengelompokan melalui WPS ini bertujuan untuk mendapatkan titik-titik strategis dalam pengembangan infrastruktur. Termasuk, infrastruktur untuk pengelolaan persampahan.

Dalam perencanaan dukungan terhadap pengembangan KSPN dilakukan dengan penyusunan *Masterplan* dan *Development Plan* (MPDP) WPS yang memuat program 10 tahunan, 5 tahunan, yang kemudian didetailkan ke dalam program jangka pendek dan tahunan. "Untuk infrastruktur pengelolaan sampah merupakan bagian perincian lebih lanjut dari MPDP yang ditelaah disusun," papar Rido.

10 KSPN prioritas, ungkap Rido, saat ini meliputi KSPN Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Wakatobi, Labuan Bajo dan Morotai. "Selain itu, ada KSPN tambahan, yakni Toraja dan Mandeh," terangnya.

Upaya pengelolaan sampah yang dapat dikembangkan untuk menangani persampahan di KSPN dapat berbentuk pengembangan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) baru, pembentukan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) di sekitar kawasan wisata serta penanganan sampah yang komprehensif. Artinya, penanganan sampah perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari destinasi wisata maupun kawasan sekitarnya.

Adapun untuk teknologi penanganan persampahan pada kawasan pariwisata, lanjutnya, Kementerian PUPR lebih condong pada penanganan tidak langsung, yakni penanganan yang menitikberatkan pada pengumpulan dan pengangkutan ke sistem persampahan perkotaan terdekat. "Agar efek limbah dari pengolahan sampah itu tidak berdampak terhadap destinasi wilayah," tegasnya.

Menurut Rido, MPDP pengembangan infrastruktur PUPR pada semua KSPN mencakup infrastruktur akses atau konektivitas, perairan, hunian serta keciptakaryaan yang meliputi pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

"Terpeliharanya kebersihan dan keindahan di destinasi wisata, diharapkan dapat mendukung tercapainya target pariwisata nasional berupa jumlah kunjungan turis asing 20 juta di tahun 2019," ungkap Rido



Kondisi pantai yang memerlukan penanganan sampah yang terkoordinir

Sumber: Dok. BPIW



Peran serta masyarakat peduli kebersihan pantai.

Sementara itu, saat rapat yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Teknologi dan Budaya Maritim, Kemenko Maritim, Safri Burhanuddin dihadiri juga perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di lokasi 10 KSPN.

Safri Burhanuddin menerangkan, saat ini ada 4 strategi pengendalian sampah yang dirumuskan pemerintah pusat. Antara lain, Pertama, peningkatan kesadaran para stakeholders. "Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye peningkatan kesadaran publik, mendorong perubahan perilaku terutama melalui sistem pendidikan," terang Safri. Kedua, pengendalian sampah teresterial dan pesisir. Untuk hal ini diperlukan rencana induk pengelolaan sampah, pengurangan penggunaan plastik di tingkat produsen, penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah serta penguatan fungsi bank sampah.

Ketiga, pengendalian sampah di laut. "Untuk ini perlu ada penegakan aturan penanganan sampah di kapal, memastikan tersedianya

sarana dan prasarana penanganan sampah di pelabuhan," jelasnya. Safri mengatakan, keempat mekanisme pendanaan dan penguatan lembaga. "Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi pendanaan APBN dan APBD, penggalangan dana donor dan

"Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye peningkatan kesadaran publik, mendorong perubahan perilaku terutama melalui sistem pendidikan," terang Safri

dan membuat wisatawan betah saat berkunjung," ucapnya. Untuk tindak lanjut lebih teknis dalam infrastruktur persampahan, Safri mencontohkan, pemerintah kota/kabupaten dapat melakukan konsultasi dengan BPIW, dalam infrastruktur pengelolaan sampah dapat cepat terwujud. "Untuk konsultasi bidang lainnya, bisa menyesuaikan dengan kementerian dan lembaga terkait. Pasalnya, pemerintah provinsi, terutama pemerintah kabupaten/kota adalah ujung tombak dalam pengelolaannya," tegas Safri. (ris/infoBPIW)

l lembaga internasional serta komite nasional guna mengintegrasikan K/L terkait," terangnya. Untuk itu, pihaknya mendorong kementerian dan lembaga pusat agar bersama-sama pemerintah provinsi serta kabupaten/kota tempat lokasi KSPN mengambil peran dalam pengelolaan persampahan.

"Mulai dari melakukan kajian sesuai tugas pokok dan fungsi, harapannya agar sampah dapat tertangani secara optimal, sehingga destinasi wisata dapat senantiasa bersih

dan membuat wisatawan betah saat berkunjung," ucapnya.

Untuk tindak lanjut lebih teknis dalam infrastruktur persampahan, Safri mencontohkan, pemerintah kota/kabupaten dapat melakukan konsultasi dengan BPIW, dalam infrastruktur pengelolaan sampah dapat cepat terwujud. "Untuk konsultasi bidang lainnya, bisa menyesuaikan dengan kementerian dan lembaga terkait. Pasalnya, pemerintah provinsi, terutama pemerintah kabupaten/kota adalah ujung tombak dalam pengelolaannya," tegas Safri. (ris/infoBPIW)



"Untuk konsultasi bidang lainnya, bisa menyesuaikan dengan kementerian dan lembaga terkait. Pasalnya, pemerintah provinsi, terutama pemerintah kabupaten/kota adalah ujung tombak dalam pengelolaannya," tegas Safri



Pemrograman Generasi Baru

Menyusun Program Tanpa Melupakan Pembiayaan



Alfa A Ash-Shiddiqi, ST. MSc

(Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Kepala Subbagian Sinkronisasi Program dan Pembiayaan I, BPIW)*

Peraturan Menteri PUPR No. 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) bertugas melaksanakan keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan pembangunan infrastruktur PUPR. Dalam pelaksanaan tugas tersebut BPIW menyusun masterplan pengembangan kawasan dan wilayah yang kemudian didetailkan menjadi development plan dan akhirnya menjadi daftar program pembangunan infrastruktur untuk jangka menengah, jangka pendek maupun jangka tahunan.

*tulisan ini hanya opini pribadi penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi institusi

Sinkronisasi program tidak bisa lepas dengan strategi pembiayaan.

Sinkronisasi program yang dilaksanakan oleh BPIW tidak bisa terlepas dengan strategi pembiayaan infrastruktur. Apalagi pada kondisi keuangan negara, dimana APBN untuk pembangunan infrastruktur belum dapat mencukupi pembiayaan infrastruktur PUPR seperti yang ditargetkan dalam Rencana Strategis PUPR 2015-2019.

Dengan demikian, inovasi dalam ranah pembiayaan menjadi sangat penting dalam pelaksanaan sinkronisasi program. Adanya *gap* kebutuhan anggaran dengan ketersediaan anggaran APBN untuk pendanaan infrastruktur bukanlah retorika belaka, faktanya mulai Tahun Anggaran 2016, terjadi *gap* antara kebutuhan dan ketersediaan dengan selisih atau kurang dari Rp 71 triliun pada TA 2016 dan kurang dari Rp 107 triliun pada TA 2017. Bahkan, untuk TA 2018 diprediksikan akan kembali terjadi *gap* sebesar kurang dari Rp 41 triliun seperti terlihat dari kebutuhan anggaran PUPR TA 2018 dalam Surat Menteri PUPR ke Menteri Keuangan sebesar Rp 147 Triliun padahal di satu sisi Kementerian Keuangan

bersikeras hanya menyediakan Rp 95 Triliun seperti diinformasikan dalam prakiraan maju Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan sesuai informasi terakhir dari Sidang Kabinet April 2017, anggaran Kementerian PUPR untuk TA 2018 sebesar Rp 106 triliun.

Sinkronisasi program yang dilaksanakan oleh BPIW tidak bisa terlepas dengan strategi pembiayaan infrastruktur. Apalagi pada kondisi keuangan negara, dimana APBN untuk pembangunan infrastruktur belum dapat mencukupi pembiayaan infrastruktur PUPR seperti yang ditargetkan dalam Rencana Strategis PUPR 2015-2019.

Jika hanya tersedia Rp 106 triliun untuk pembangunan infrastruktur PUPR TA 2018, maka bukan hanya banyak target pembangunan infrastruktur PUPR yang tidak akan tercapai, namun juga ada beberapa resiko penyelenggaraan infrastruktur utamanya Jalan dan Sumber Daya Air yang akan terdampak.

Hal ini karena, belanja mengikat kementerian PUPR yang harus dianggarkan untuk TA 2018 sudah sebesar Rp 58 triliun. Belanja mengikat

tersebut terdiri dari sekitar Rp 5 triliun untuk belanja pegawai dan operasional kantor, operasi dan pemeliharaan aset sumber daya air dan jalan jembatan, serta pemenuhan *Multi Years Contract* yang sudah *committed*.





Berbagai strategi pemrograman dan penajaman program untuk TA 2018 sudah mulai di-*exercise*, namun nampaknya tanpa ada inovasi dalam hal pembiayaan infrastruktur, maka resiko penurunan performa penyelenggaraan infrastruktur Jalan dan Sumber Daya Air akan terasa dampaknya di TA 2018. Oleh karenanya, para pelaku sinkronisasi pemrograman sudah selayaknya berfokus dalam mengembangkan inovasi pembiayaan infrastruktur sebagai solusi dari kondisi tersebut.

Para pelaku pemrograman harus juga mulai berfikir diluar rutinitas pelaksanaan sehari-hari siklus pemrograman, hal ini karena pandangan bahwa anggaran pembangunan infrastruktur akan disediakan oleh APBN sudah semakin tidak relevan. Pelaku pemrograman harus memikirkan sumber-sumber pembiayaan diluar APBN. Beberapa skema seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) memang sudah mulai dikembangkan, utamanya pada sektor pembiayaan jalan tol, pembiayaan infrastruktur air minum dan perumahan rakyat. Namun pada umumnya hal tersebut belum banyak menjadi perhatian dari pelaku pemrograman, serta dilaksanakan oleh unit terpisah dari unit pelaku pemrograman.

Pembiayaan dan Pendanaan (*Financing vs Funding*).

Pembiayaan dan Pendanaan sekilas hampir mirip secara arti karena keduanya mengeluarkan uang untuk pelaksanaan pekerjaan. Pembiayaan adalah sejumlah modal atau uang yang disediakan oleh suatu institusi untuk membiayai suatu pekerjaan dengan harapan akan adanya pengembalian atau tambahan bunga dan manfaat. Pendanaan, dilain sisi, adalah sejumlah modal atau uang yang disediakan oleh suatu institusi untuk mendanai suatu pekerjaan tanpa harapan akan pengembalian akan modal tersebut atau sebagai donasi. Jadi, perbedaan antara pembiayaan dan pendanaan adalah dalam hal harapan akan dikembalikannya modal tersebut.

Inovasi Pembiayaan Infrastruktur

Saat ini, Skema Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA), mulai digalakkan oleh Presiden Joko Widodo, utamanya dengan mengikutsertakan institusi dana-dana jangka panjang seperti Dana Haji, Dana Pensiun, BPJS, dan Taspen selain juga dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI guna masuk dalam investasi jangka panjang dengan garansi pemerintah. Menurut Beppenass, prioritas proyek

yang dipilih untuk didanai dengan skema PINA memiliki 4 kriteria, yakni: pertama, mendukung percepatan target prioritas pembangunan nasional. Kedua, memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia. Ketiga, memiliki kelayakan komersial. Kemudian keempat yakni memenuhi kriteria kesiapan (*readiness criteria*). PINA dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang berasal dari penanam modal, dana kelolaan, perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lain, dan sumber pembiayaan lain yang sah.

Selain PINA, pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU atau

Public Private Partnership (PPP) sudah lebih dahulu diperkenalkan. Kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur selain juga memberikan transfer pengetahuan, teknologi dan pengalaman mengelola infrastruktur.

Namun demikian, terkait hal tersebut ada beberapa hal yang kiranya perlu diperhatikan yaitu:

1. Skema pembagian resiko yang jelas dan fair antara investor dengan pemerintah dan pelaksana pekerjaan
2. Penyiapan biaya untuk studi kelayakan, proses lelang sampai dengan *financial close* harus tetap diperhatikan dan disiapkan dengan rapi
3. Alokasi dana untuk menyubsidi agar pekerjaan menjadi *financially viable* atau *Viability Gap Funding* harus tetap disiapkan dan dihitung dengan cermat
4. Kementerian PU sebagai penyelenggara KPBU harus meningkatkan kapasitasnya utamanya pelaksana proyek / PPK di lapangan
5. Peran Pemerintah Daerah dalam pengenalan dan promosi tentang KPBU di daerah perlu terus kita dorong.

Beberapa inovasi pembiayaan lainnya selain APBN dan APBD adalah Penyertaan Modal baik (PMN/ Penyertaan Modal Negara) ataupun (PMD/ Penyertaan Modal Daerah),

Hibah, Obligasi/Surat Utang Negara, Obligasi Syariah/Sukuk, *Performance Based Annuity Scheme* (PBAS), maupun penugasan BUMN/ BUMD.

Obligasi dan obligasi syariah/ Sukuk berbeda dalam beberapa hal, diantaranya: Sukuk memerlukan *underlying asset* sebagai dasar penerbitan dan fatwa syariah untuk menjamin tercapainya prinsip syariah sedangkan obligasi tidak mensyaratkannya. Sukuk bisa digunakan untuk pembiayaan pekerjaan jangka pendek-menengah, sedangkan obligasi biasanya untuk jangka menengah-panjang.

Penggunaan Sukuk sejak awal sudah terdefiniskan untuk membangun pekerjaan tertentu sehingga resiko sukuk sudah jelas lingkupnya. Oleh karenanya, kedisiplinan kita dalam penggunaan dana sukuk juga

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (UU 19 Tahun 2008).

Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek. Upaya pengembangan instrumen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini bertujuan untuk: (1) memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah; (2) memperluas basis pembiayaan anggaran negara; (3) menciptakan benchmark instrumen keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional; (4) memperluas dan mendiversifikasi basis investor; (5) mengembangkan alternatif instrumen investasi baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri yang mencari instrumen keuangan berbasis syariah; dan (6) mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia.



Penandatanganan perjanjian penjaminan & regres proyek jalan Tol.

dituntut karena lingkup dana sukuk yang sudah tertentu tersebut (untuk suatu proyek yang sudah ditentukan saja).

Skema lainnya adalah PBAS (*Performance Based Annuity Scheme*) atau Pembayaran Tahunan Berdasar Kinerja). PBAS ini meng-encourage operator pekerjaan agar bekerja efisien dan memastikan pelayanan sesuai dengan yang disyaratkan dalam perjanjian. Hal krusial dari PBAS adalah perhitungan resiko (atau potensi keuntungan) haruslah cermat agar nilai pekerjaan menarik bagi investor.

Peran BPIW dalam PPP Unit di Kementerian PUPR

Hasil rapat pimpinan eselon I PUPR yang membahas mengenai konsep kelembagaan PPP Unit di Kementerian PUPR, Ditjen Bina Konstruksi mengisyaratkan agar *output* yang dihasilkan oleh BPIW menjadi *feedback* untuk PPP Unit dalam melaksanakan tugasnya (sebagai penyusun NSPK Investasi, penyusun pedoman Investasi, *gate keeper* PPP *project* serta promosi). Mempertimbangkan hal tersebut, BPIW berperan menganalisis dan memberikan arahan program-program pembangunan infrastruktur yang berpotensi tidak hanya dapat dikerjasamakan melalui PPP namun juga berpotensi untuk dibiayai dengan dana selain APBN.



Peran ini harus mulai diimplementasikan dalam setiap tahapan pelaksanaan perencanaan dan pemrograman yang merupakan tugas BPIW. Dari tahapan Rencana Induk Pulau/Wilayah/Kawasan harus sudah mulai dianalisis rencana-rencana pembangunan infrastruktur yang berpotensi dibiayai dengan dana selain APBN. Kemudian pada tahapan selanjutnya di program jangka menengah (5 tahun), jangka pendek (3 tahunan) dan program tahunan sudah harus semakin tajam analisis dan informasi yang dihasilkan mengenai program yang berpotensi untuk dibiayai oleh non-APBN.

Untuk itu, perubahan paradigma perlu dilakukan dari hanya sekedar menggenerate rencana yang terpadu dan program yang sinkron menjadi paradigma penyusunan rencana terpadu dan program yang sinkron dengan sudah menjawab sumber pembiayaan dari program tersebut. Pembiayaan sudah harus mulai difikirkan dari sejak tahap rencana yang terpadu.

Pemrograman generasi baru

Maksud utama dari kolom opini yang ditulis oleh penulis pada intinya adalah mengingatkan kembali para pelaku pemrograman agar tidak terjebak pada rutinitas pelaksanaan siklus pemrograman. Opini ini dimaksudkan agar selain menyusun program, inovasi-



inovasi pembiayaan infrastruktur juga seharusnya sudah mulai difikirkan, bahkan pada tahapan pra-penyusunan program yaitu penyusunan rencana induk/*masterplan* maupun rencana pengembangan/*development plan* pada tahapan perencanaan.

adalah lain hal. Hal utama yang perlu dilaksanakan adalah mencoba mengimplementasikannya secara langsung *project by project* agar kapasitas/kompetensi pelaku pemrograman dalam hal pembiayaan terus meningkat (*learning by doing*).

Pelaku pemrograman harus mencoba mengimplementasikan konsep-konsep inovasi pembiayaan tersebut pada program-program yang disusun. Berhasil tidaknya pengimplementasian inovasi pembiayaan tersebut sampai dengan *financial-closing* ataupun pelaksanaan konstruksi adalah lain hal.

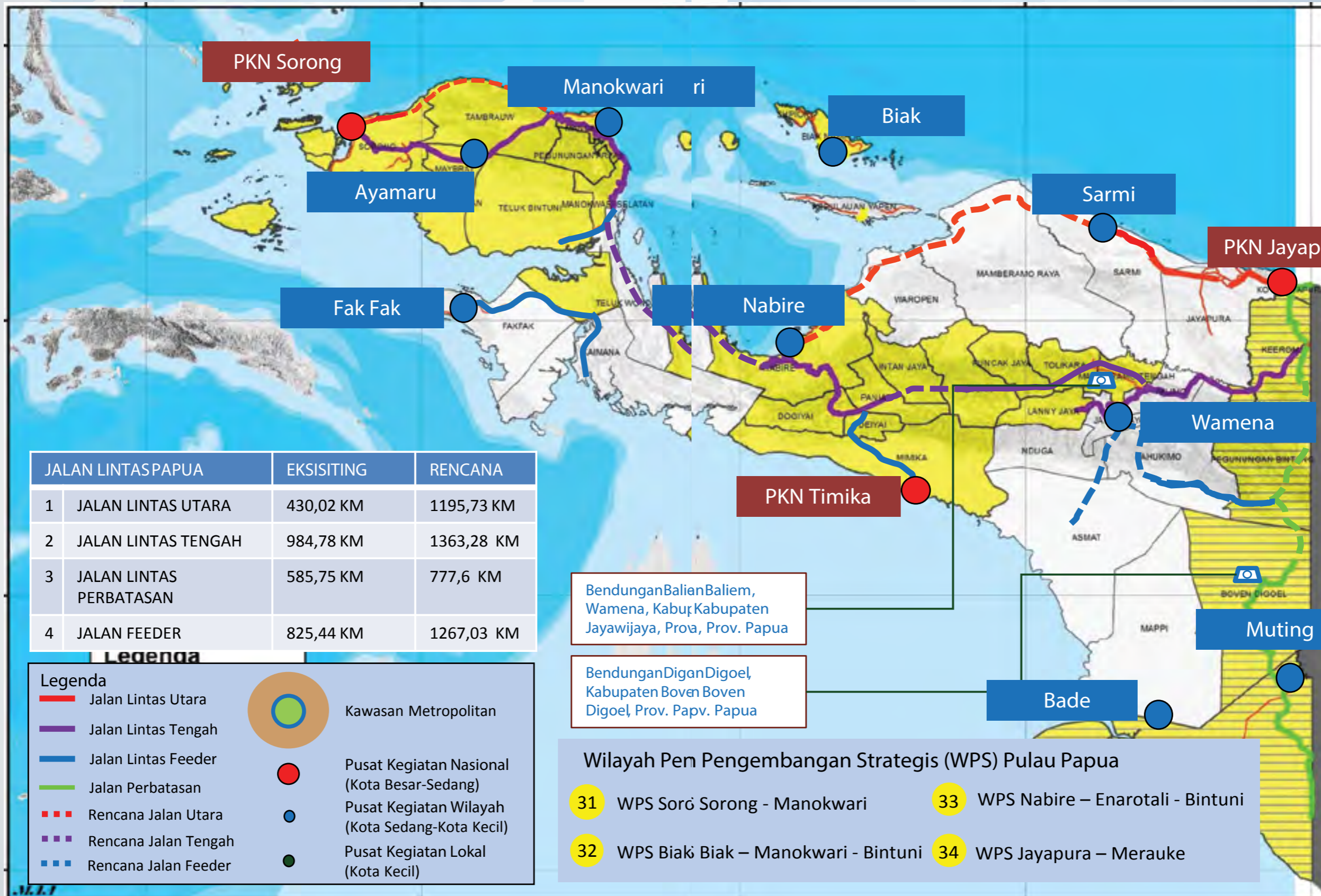
Beberapa kajian mengenai inovasi pembiayaan baik KPB, PINA sudah sering dikaji oleh para pelaku pemrograman, namun hal itu (kajian saja) tidak lah cukup. Pelaku pemrograman harus mencoba

Jika inovasi pembiayaan tidak dimulai dari saat ini, maka pemrograman akan hanya menjadi rutinitas birokrasi tanpa ada kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur.

mengimplementasikan konsep-konsep inovasi pembiayaan tersebut pada program-program yang disusun. Berhasil tidaknya pengimplementasian inovasi pembiayaan tersebut sampai dengan *financial-closing* ataupun pelaksanaan konstruksi

SISTEM KONEKTIVITAS NASIONAL PULAU PAPUA

Pembangunan Infrastruktur di Pulau Papua berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Dalam Sistem Konektivitas Nasional untuk 2 Provinsi di Pulau Papua ini terdapat 4 WPS, yakni WPS 31 Sorong-Manokwari, WPS 32 Biak-Manokwari-Bintuni, WPS 33 Nabire-Enarotali-Wamena, dan WPS 34 Jayapura-Merauke. Pulau ini juga memiliki Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yakni di Sorong, Timika dan Jayapura.



Wisata Bersejarah Di Kota Seribu Benteng

Benteng Kalamata

Kota Ternate, merupakan kota yang dijuluki sebagai kota 1000 benteng ini merupakan kota yang mempunyai banyak sejarah di jaman Kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana tidak, Kota yang memiliki luas wilayah 547,736 km² ini demi mengamankan perdagangan rempah – rempah Portugis, Spanyol, dan Belanda, membangun benteng – benteng pertahanan di Maluku Utara. Di Ternate inilah berdiri sisa-sisa benteng yang pernah menjadi saksi kejayaan rempah nusantara.

Dilihat dari letak daerah topografinya Ternate yang masuk kedalam WPS 29 ini, merupakan salah satu pulau yang terletak di sebelah barat pantai Halmahera dan merupakan salah satu deretan pulau – pulau vulkanis yang masih aktif. Untuk kedudukan kota ternate sendiri adalah sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan yang sangat strategis hal tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan infrastruktur di kota Ternate yakni Perdagangan.

Di kota Ternate tercatat ada

beberapa benteng dan juga tempat wisata yang dapat dikunjungi diantaranya Benteng Fort Oranje, Benteng Kalaumata, Benteng Kastela, Benteng Tolukko, dan juga Istana Kesultanan Ternate:

Kota yang memiliki luas wilayah 547,736 km² ini demi mengamankan perdagangan rempah – rempah Portugis, Spanyol, dan Belanda, membangun benteng – benteng pertahanan di Maluku Utara.

Benteng Oranje

Benteng Oranje didirikan pada tanggal 26 Mei 1607 oleh Cornelis Marclief de Jonge dan diberi nama Benteng Oranje oleh Francois Witlent pada tahun 1609 pada masa pemerintahan Sultan Mudaffar. Dulunya sebelum dibangun menjadi sebuah benteng oleh pemerintah kolonial Belanda, tempat ini dulunya merupakan benteng tua yang dibangun oleh bangsa Portugis,

dan saat ini, Benteng Oranje menjadi sumber pembelajaran yang menarik bagi dunia ilmu pengetahuan karena kawasan ini telah dimanfaatkan sebagai museum rempah-rempah kota Ternate namun, sekarang fungsinya telah berubah dan dialihfungsikan menjadi Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Ternate. Tidak hanya itu saja, kita dapat melihat keindahan sekitar benteng yang nampak sangat memukau. Struktur sejarahnya yang kental juga masih terasa di wilayah benteng tersebut.

Saat ini, benteng Oranje ini juga menjadi tempat wisata yang murah meriah bagi para pengunjung. Terlebih, lokasi benteng ini menjadi tempat hunting foto yang sangat menarik dan dengan letaknya yang sangat strategis tersebut, menjadikan benteng ini semakin mudah untuk dikunjungi oleh para wisatawan.

Benteng Kalamata

Selain Benteng Oranje, ada juga benteng yang cukup dikenal di Maluku Utara yakni Benteng Kalamata atau disebut juga Benteng Kayu Merah. Nama kalamata itu sendiri berasal

dari nama Pangeran Kalamata yakni adik dari Sultan Ternate Madarsyah. Benteng ini didesain menyerupai empat penjuru mata angin dan memiliki empat bastion berujung runcing dan memiliki lubang bidik, dan dibangun pada tahun 1540 untuk menghadapi serangan Spanyol dari Rum, Tidore. Kemudian, benteng ini dipugar oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Pieter Both pada tahun 1609. Berlokasi di kelurahan Bastiong, kecamatan Ternate Utara, benteng ini menjadi salah satu benteng favorit yang berada di pulau seribu. Yang lebih menarik dari benteng ini adalah masih berdiri dengan kokoh sampai sekarang. Jaman dahulu benteng ini berfungsi sebagai benteng penyerangan dan menahan serangan dari bangsa Spanyol.

Benteng Tolukko

Benteng Tolukko merupakan salah satu saksi sejarah yang kita jumpai di Ternate. Benteng ini merupakan salah satu benteng yang terkenal di Ternate, yang dibangun oleh seorang panglima Portugis yang bernama Fransisco Serao pada tahun 1540. Benteng Tolukko ini berlokasi di Desa Sangadji, Kecamatan Ternate Utara, dibangun sebagai

bentuk pertahanan dalam menguasai cengkong yang merupakan komoditi utama di Ternate diwaktu dulu. Pada jaman dahulu benteng ini dikenal dengan nama benteng Hollandia, yang dibangun diatas fondasi batuan beku dan terbentuk dari tiga buah bastion, ruang bawah tanah, halaman dalam, lorong serta bangunan utamanya berbentuk segi empat. Untuk konstruksi bangunannya terbuat dari campuran batu kali, batu karang, pecahan batu bata yang direkat oleh campuran kapur serta pasir. Dan yang membuat menarik di benteng ini adalah dikelilingi sebuah taman yang tertata dengan sangat rapi.

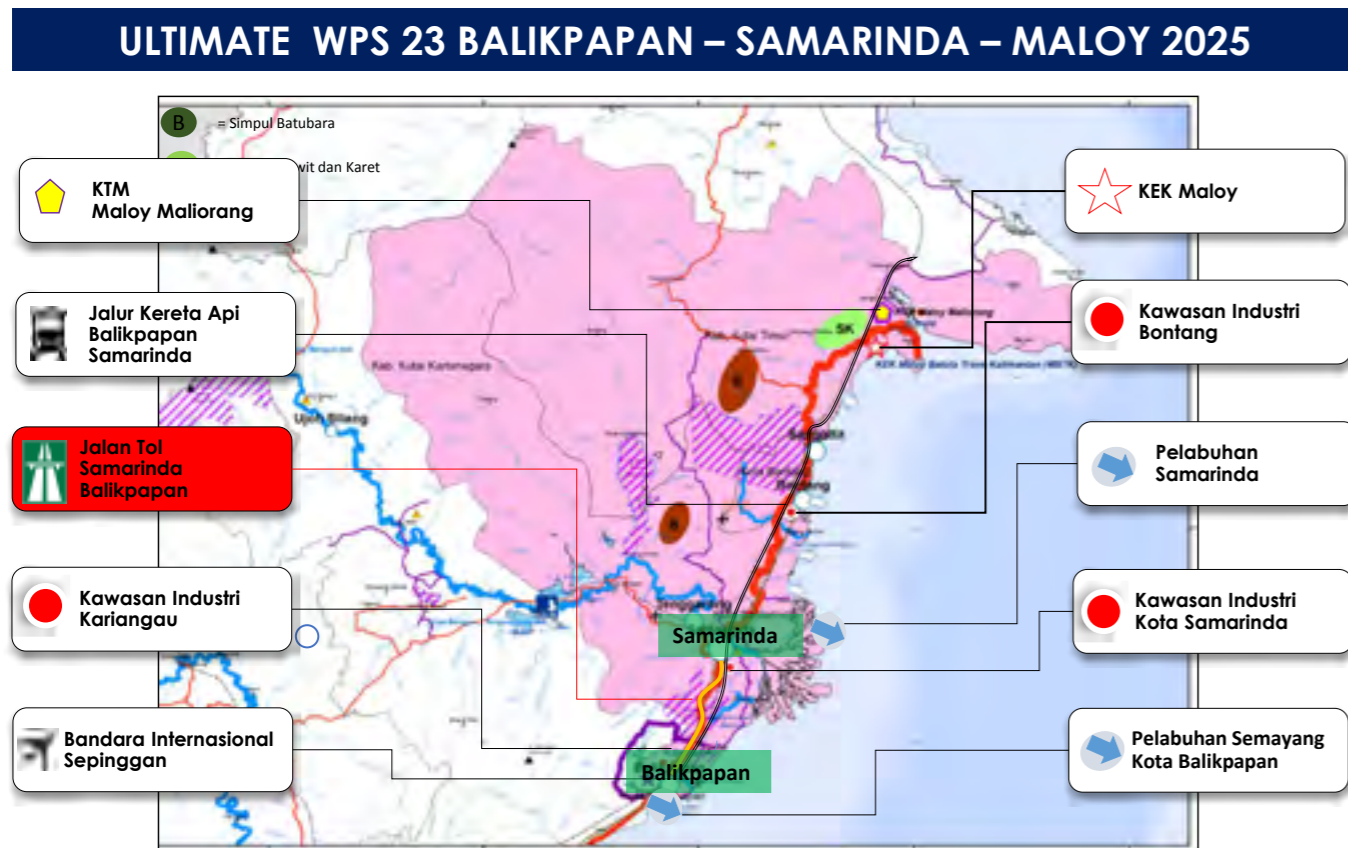
Istana Kesultanan Ternate

Untuk wisata yang bernilai sejarah selain benteng, kita juga bisa mengunjungi Istana terkenal dikota Ternate yakni istana kesultanan Ternate atau yang dikenal dengan kerajaan Gapi. Kerajaan ini merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia. Untuk letak dari istana kesultanan Ternate ini tidak jauh dari pusat kota dan berada di daratan pantai di Kampung Soa – Sio, Kelurahan Letter C, Kodya Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Pada tanggal 7 Desember 1976, Istana ini dimasukkan sebagai benda cagar budaya karena mengingat sejarah istana ini memiliki peran penting di kawasan Timur Indonesia sejak anad X000 hingga abad XVII. Dimana masa keemasannya, kekuasaan kesultanan membentang mulai dari seluruh wilayah Maluku, Sulawesi Utara, serta kepulauan-kepulauan di Filipina Selatan, hingga kepulauan Marshall di Pasifik.



Wilayah Pengembangan Strategis 23 Balikpapan – Samarinda – Maloy 2017



Ultimate:

Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sampai dengan tahun 2025 di Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 23 Balikpapan-Samarinda-Maloy diantaranya, pembangunan Infrastruktur Jalan tol Samarinda-Balikpapan, mendukung beberapa pembangunan, seperti pembangunan jalur kereta api Balikpapan-Samarinda, Selain itu ada juga pembangunan kawasan industri Bontang, pembangunan kawasan industri Kariangau, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy dan juga pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Maloy Maliorang.

Program Utama:

Pada program utama WPS 23 Balikpapan-Samarinda-Maloy untuk tahun 2017, meliputi pembangunan jalan Petung-Kenanga-Semoi¹ – Sepaku-Sp Semboja, pembangunan jalan penghubung Tenggarong Samarinda, pembangunan jalan Balang, pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,02 kilometer, dan juga peningkatan kapasitas jalan trans Kalimantan Samarinda Bontang. Selain pembangunan jalan, di WPS 23 Balikpapan – Samarinda – Maloy ada rencana pembangunan intake Loa Kulu IPA Loka Bahi, Kota Samarinda, Pembangunan Waduk Lambakan, Pembangunan Bendungan Marangkayu, pembangunan Bendungan Teritip, dan juga pembangunan rumah pekerja di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy.

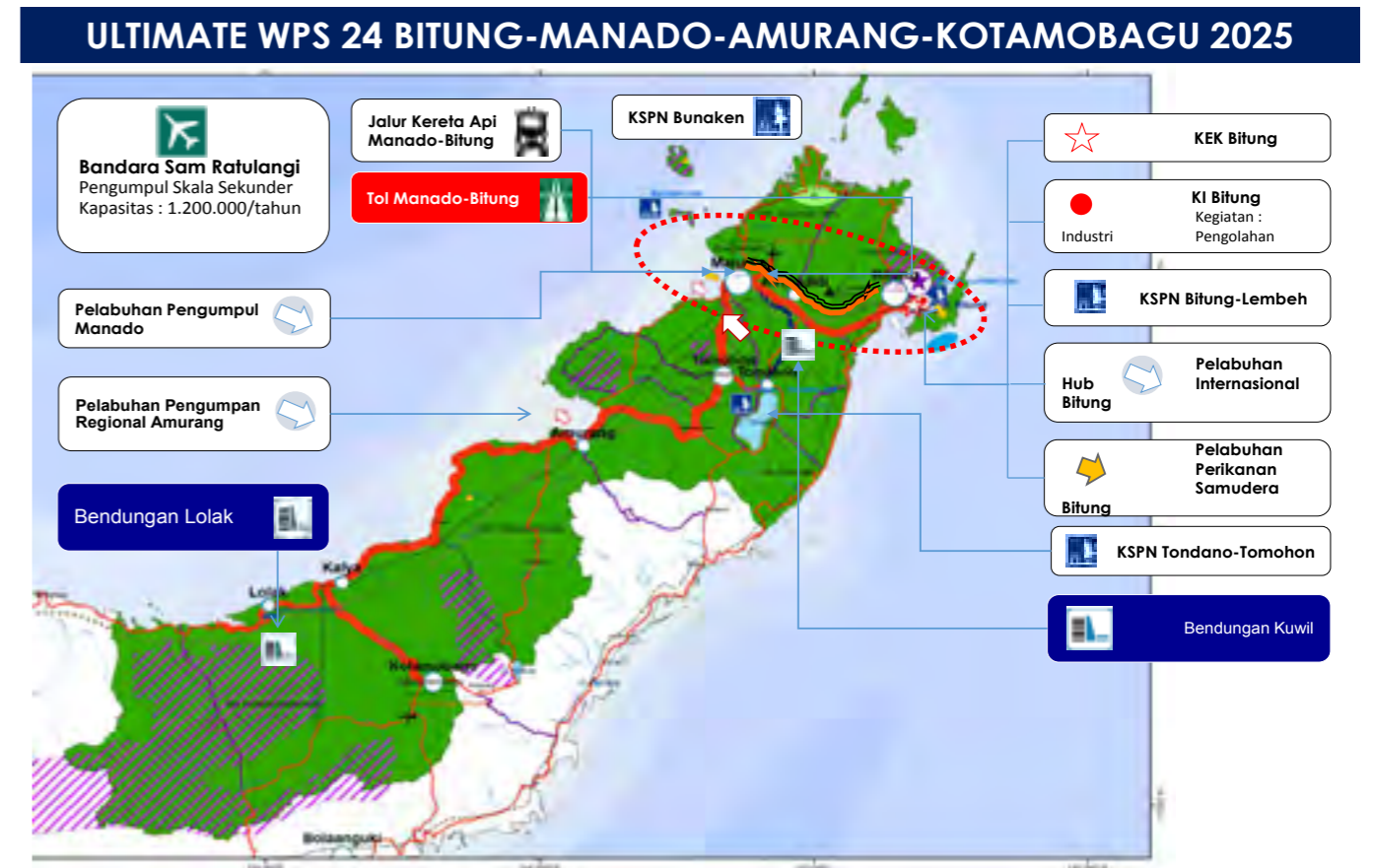
Wilayah Pengembangan Strategis 24 Bitung – Manado – Amurang – Kotamobagu

Ultimate:

Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sampai dengan tahun 2025 di WPS 24 Bitung – Manado – Amurang – Kotamobagu, merencanakan pembangunan jalan tol Manado – Bitung. Selain itu mendukung pembangunan Bandara Sam Ratulangi, pembangunan pelabuhan pengumpul Manado, pembangunan pelabuhan Pengumpuan Regional Amurang, dukungan pembangunan bendungan Lolak, dan juga pembangunan jalur kereta api Manado – Bitung. Ada juga pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bunaken, Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, pembangunan Kawasan Industri Bitung, pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bitung – Lembeh, pembangunan pelabuhan internasional Bitung, pembangunan pelabuhan perikanan samudera, pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tondano – Tomohon, dan juga pembangunan bendungan kuwil.

Program Utama

Pada program utama WPS 24 Bitung – Manado – Amurang – Kotamobagu, ada rencana pembangunan terdiri dari pembangunan Manado Outer Ring Road (MORR), pembangunan jalan alternatif Manado – Tomohon, pembangunan jalan tol Manado – Bitung (Lanjutan), pengembangan dan pelebaran ruas jalan Amurana – Waratlam, pembangunan jalan nasional akses kawasan ekonomi khusus – Tol Manado – Bitung, dari pintu tol km 28 sepanjang 5 kilometer, selain jalan, program utama wps 24 meliputi pengembangan instalasi Pengolahan Air (IPA) bersih, pembangunan perumahan di Kota Manado, Pembebasan Lahan Saluran Primer – 1, Primer – 2, Primer – 3 Lolak (lanjutan), pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM), Pembangunan IPAL Kws. Kota Bitung, Pengembangan TPA sistem sanitary landfill, pembangunan Bendungan Kuwil (lanjutan) Pembebasan Lahan Saluran Primer-1, Primer-2, Primer-3 Kuwil, dan juga Penataan Bantaran Sungai Tondano.



Judesa, Teknologi Jembatan Fleksibel dan Ekonomis



Kawasan perdesaan sering dihadapkan pada permasalahan infrastruktur. Salah satunya belum ada jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan desa satu dengan yang lainnya. Bahkan, tak jarang kondisi jembatan yang kurang kokoh sehingga tak layak untuk digunakan. Untuk menjawab kondisi tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (PUSJATAN) mengembangkan Judesa atau Jembatan untuk Desa Asimetris, adalah fungsi dan kemampuannya yang sangat cocok diterapkan di perdesaan, yaitu fleksibel dan ekonomis.

Sebelum jembatan Judesa itu dibangun, masyarakat di perdesaan hanya menggunakan jembatan bambu yang berkali-kali ambruk diterjang arus sungai. Namun dengan adanya Judesa, maka permasalahan tersebut tak terjadi lagi. Pasalnya material Judesa merupakan hasil pre pabrikasi atau bahan dibuat/



dicetak dipabrik dan dikirim ke lokasi. Dengan demikian bahan disiapkan terlebih dahulu sebelum dikirim ke lokasi, sehingga membuat waktu pengerjaan jembatan lebih cepat.

Sistem jembatan ini dibuat modular, sehingga mudah dibangun dengan swadaya masyarakat. Tidak hanya itu, penggunaan tiang dibuat tunggal, sehingga mengurai biaya pembuatan struktur jembatan. Judesa ini tersedia dalam bentang 40 meter dan 120 meter.

Disamping itu, pembangunan jembatan ini dilakukan dari satu sisi sungai, sehingga sangat cocok untuk membuka jalur perintis dan mengurangi pengangkutan material yang menyeberangi sungai. Komponen jembatan juga didisain sedemikian rupa, sehingga mengurangi biaya material struktur jembatan seperti penggunaan tiang tunggal.

Penerapan jembatan tersebut telah dilakukan Kementerian PUPR, dimana Judesa pertama telah diresmikan penggunaannya yakni di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jembatan tersebut menghubungkan dua desa, yaitu Desa Cihawuk dan Desa Cibeureum. Panjang bentang jembatan mencapai 42 meter dan lebar 1,80 meter. Dengan ukuran ini jembatan dapat dilalui pejalan kaki dan sepeda motor. Biaya yang digunakan untuk membangun Judesa yakni sebesar Rp 370 juta dan dibangun dalam waktu 2 bulan dengan melibatkan masyarakat sekitar. Pembangunan jembatan itu disambut suka cita masyarakat setempat, karena dapat memudahkan aktivitas mereka sehari-hari. **(Andhika)**



Sistem jembatan ini dibuat modular, sehingga mudah dibangun dengan swadaya masyarakat. Tidak hanya itu, penggunaan tiang dibuat tunggal, sehingga mengurai biaya pembuatan struktur jembatan. Judesa ini tersedia dalam bentang 40 meter dan 120 meter.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Sepanjang bulan April, beberapa daerah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dan beberapa Kepala Pusat, dalam waktu yang berbeda menjadi pengarah pada kegiatan tersebut. Berikut dokumentasinya.

Musrenbangnas



Pembahasan materi



Suasana diskusi

Jawa Timur



Menyanyikan lagu Indonesia Raya



Suasana pembukaan

Aceh



Peserta Musrenbangprov



Acara seremoni pembukaan

Bali



Peserta sedang menyimak jalannya acara



Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Hadi Sucahyono

Kepulauan Riau



Suasana pembukaan Musrenbangprov



Paparan narasumber

Kalimantan Barat



Pembukaan Musrenbangprov



Pera pembicara Musrenbangprov

Kalimantan Tengah



Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Hadi Sucahyono menjadi pembicara



Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran memberikan kata sambutan

Sulawesi Utara



Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan saat membubuhkan tandatangan



Ramah tamah disela-sela Musrenbangprov

Maluku



Kebersamaan saat pembukaan Musrenbangprov



Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW, Bobby Prabowo saat berpidato



Pentingnya Air Bagi Kehidupan

Air

Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di Bumi, tetapi tidak di planet lain. Air menutupi hampir 71% permukaan Bumi. Terdapat 1,4 triliun kilometer kubik (330 juta mil³) tersedia di Bumi. Air sebagian besar terdapat di laut (air asin) dan pada lapisan-lapisan es (di kutub dan puncak-puncak gunung), akan tetapi juga dapat hadir sebagai awan, hujan, sungai, muka air tawar, danau, uap air, dan lautan es. Air dalam objek-objek tersebut bergerak mengikuti suatu siklus air, yaitu melalui penguapan, hujan, dan aliran air di atas permukaan tanah, meliputi mata air, sungai, muara hingga menuju laut.

Hari Air Sedunia

Hari Air Sedunia (*World Day for Water*) adalah peringatan yang ditujukan sebagai usaha-usaha menarik perhatian publik akan pentingnya air bersih dan usaha penyadaran untuk pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan. Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret, inisiatif peringatan ini di umumkan pada Sidang Umum PBB ke-47 tanggal 22 Desember 1992 di Rio de Janeiro, Brasil

Pengelolaan Air

Begitu pentingnya air bagi kehidupan menuntut pengelolaan sumber daya air harus baik. Untuk itu Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur sumber daya air sejak tahun 2004, yakni Undang Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Air dan Manusia

Peradaban manusia berjaya mengikuti sumber air. Mesopotamia yang disebut sebagai awal peradaban berada di antara sungai Tigris dan Euphrates. Peradaban Mesir Kuno bergantung pada sungai Nil. Pusat-pusat manusia yang besar seperti Rotterdam, London, Montreal, Paris, New York City, Shanghai, Tokyo, Chicago, dan Hong Kong mendapatkan kejayaannya sebagian dikarenakan adanya kemudahan akses melalui perairan.

Tubuh manusia juga terdiri dari 55% sampai 78% air, tergantung dari ukuran badan. Agar dapat berfungsi dengan baik, tubuh manusia

membutuhkan antara satu sampai tujuh liter air setiap hari untuk menghindari dehidrasi; jumlah pastinya bergantung pada tingkat aktivitas, suhu, kelembaban, dan beberapa faktor lainnya. Selain dari air minum, manusia mendapatkan cairan dari makanan dan minuman lain selain air.

Sebagian besar orang percaya bahwa manusia membutuhkan 8-10 gelas (sekitar dua liter) per hari, namun hasil penelitian yang diterbitkan Universitas Pennsylvania pada tahun 2008 menunjukkan bahwa konsumsi sejumlah 8 gelas tersebut tidak terbukti banyak membantu dalam menyehatkan tubuh. Malah kadang-kadang untuk beberapa orang, jika meminum air lebih banyak atau berlebihan dari yang dianjurkan dapat menyebabkan ketergantungan. Literatur medis lainnya menyarankan konsumsi satu liter air per hari, dengan tambahan bila berolahraga atau pada cuaca yang panas. Minum air putih memang menyehatkan, tetapi kalau berlebihan dapat menyebabkan hiponatremia yaitu ketika natrium dalam darah menjadi terlalu encer. (* /ris/berbagai sumber)





8 Tips Agar Selalu Berinovasi di Tempat Kerja

Disadari atau tidak, inovasi adalah sesuatu bagian penting dari kehidupan manusia. Setiap orang pasti pernah melakukan inovasi baik itu sepele maupun inovasi yang berguna untuk kepentingan orang banyak. Tidak hanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, inovasi juga kerap lahir di lingkungan kerja. Namun terkadang, untuk bisa terus kreatif dan berinovasi di tempat kerja bukanlah suatu hal yang mudah. Tetapi, bukan berarti Anda tidak bisa menjadi seorang yang terus bisa berinovasi dan kreatif di tempat kerja. Hal-hal seperti inovasi atau kreatif tersebut bukan mustahil untuk Anda pelajari. Berikut 10 tips mudah untuk memacu kreativitas sehingga Anda dapat melahirkan ide maupun karya inovatif di tempat kerja.

1. Memiliki kebiasaan yang ditemukan pada orang-orang yang sangat inovatif dan kreatif

Empat kebiasaan yang ditemukan pada orang-orang yang sangat inovatif dan kreatif yang dirangkum dari buku "The Myths of Innovation" karangan Scott Berkun yaitu memiliki Kegigihan/keuletan, Menghilangkan Kebiasaan Membatasi Diri, berani mengambil Risiko dan tidak takut

membuat Kesalahan, memiliki rasa ingin tahu yang besar.

2. Carilah inspirasi dari lingkungan sekitar
Setiap kali Anda melihat sesuatu dari dunia di luar sana yang menangkap perhatian Anda, maka ambil sesuatu tersebut sebagai suatu inspirasi Anda. Anda dapat menyusun dan mengumpulkan banyak inspirasi-inspirasi yang dapat Anda temukan di sekeliling Anda tersebut dengan mencatatnya pada sebuah Post-It/Catatan tempel, kemudian menempelkannya di dinding atau di komputer Anda.

3. Perbanyak relasi dan teman
Inovasi jarang terjadi jika dipikirkan hanya satu kepala saja. Namun ketika Anda punya teman atau partner untuk berdiskusi, gagasan cemerlang seringkali lahir secara spontan. Dengan berdiskusi, Anda pun dapat sekaligus berlatih untuk terus bisa mengasah kreativitas dan inovasi Anda.

4. Ikut terlibat dalam proyek kecil-kecilan
Kita sering berpikir bahwa ide harus selalu besar, transformatif, dan game-changing. Namun seringkali, hal kecil atau ide yang kecil justru bisa menjadi hal baru yang akan menambahkan atau justru bisa membuat perbedaan yang besar. Manfaat untuk inovasi berskala kecil tetapi mampu menghasilkan hasil yang besar tak bisa Anda anggap remeh.

5. Mengurangi asumsi negatif
Ada baiknya Anda mengurangi asumsi

negatif Anda, agar Anda lebih terbuka dan tidak terpenjara pikiran-pikiran negatif yang justru nantinya tak membuat Anda berinovasi. Berprasangka buruk juga hanya akan mempertumpul kreativitas Anda.

6. Ubah konsep di pikiran menjadi aksi nyata

Berhenti berbicara dan mulai membangun! Taruh pikiran Anda ke dalam kata-kata, kemudian taruh kata-kata Anda ke dalam gambar, dan taruh gambar Anda ke dalam prototype. Ketika orang lain hanya mendengar ide Anda, mereka cenderung untuk melupakannya dan hampir tidak mungkin untuk menganggapnya serius dan terlibat dalam pengembangannya. Maka, Anda sendiri yang harus membangunnya.

7. Berpikir dinamis

Walaupun mungkin terdengar berlawanan dengan intuisi, memiliki kendala dan parameter sebenarnya menginspirasi inovasi dengan memaksa Anda untuk berpikir secara dinamis dan kreatif.

8. Terus asah kreativitas

Umpan pikiran Anda dengan kreativitas bukan menyelam ke hal-hal baru yang siap Anda pelajari setiap hari. Apapun itu, pastikan bahan bakar imajinasi Anda cukup untuk membangun suatu kreativitas.

Tindakan Anda akan menginspirasi orang lain dalam tim Anda untuk bergabung mengasah inovasi. Selamat mencoba!

Obrolan

Bang Egi merupakan tokoh kartun dalam Obrolan, dan Egi juga sapaan akrab dari "Sinergi".

BANG EGI



Kartunis: Oki Heryantao

Pembangunan Infrastruktur di NTT Memerlukan Dukungan Kementerian PUPR

Frans Lebu Raya

Gubernur Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. Salah satunya adalah pariwisata. Setidaknya ada 2 kawasan pariwisata yang sangat menarik untuk dikembangkan yakni Pulau Komodo di Labuan Bajo dan Danau 3 Warna di Kelimutu. Gubernur NTT, Frans Lebu Raya menyatakan dalam mengembangkan kawasan wisata itu, daerahnya sangat membutuhkan dukungan infrastruktur dari Kementerian PUPR.

"Kami saat ini sedang membangun sektor pariwisata. Untuk itu kami sangat membutuhkan infrastruktur pendukung dari Kementerian PUPR, yakni jalan menuju obyek wisata. Dengan jalan yang bagus maka akan memudahkan para wisatawan menuju obyek wisata tersebut," ucap Frans beberapa waktu lalu di Kupang.

Potensi lain di NTT yang memerlukan dukungan infrastruktur Kementerian PUPR menurut Frans adalah bidang pertanian.

Apalagi saat ini Pemerintah Provinsi NTT sedang mengembangkan produksi jagung. Tidak hanya itu, Frans juga bertekad mengembangkan ternak sapi. "Kami bertekad menjadikan NTT sebagai provinsi pemasok ternak. Dulu NTT mengeksport ternak sapi ke Hongkong. Sekarang kita kembangkan lagi hampir 1 juta ekor. Kita butuh air untuk itu dan juga untuk menghadapi musim kemarau," ungkap Frans.

Terkait masalah air ini, Frans menyatakan terimakasihnya kepada pemerintah melalui Kementerian PUPR, karena dalam kurun waktu 5 tahun, akan dibangun 7 bendungan di NTT. Dengan kondisi daerah yang rata-

rata kering, maka menurut Frans ketujuh bendungan tersebut sangat bermanfaat dalam menjaga ketersediaan air di NTT. "Untuk pertama kalinya kita mendapat alokasi bendungan yang banyak, sehingga air

selalu tersedia. Apalagi daerah kita adalah daerah dengan cuaca panas," tutur Frans.

Ia juga menilai kondisi geografis NTT yang dikelilingi lautan menjadi potensi yang dapat diolah untuk menghasilkan garam. Dikatakannya bahwa di NTT terdapat 50 ribu hektar yang dapat dibuat garam. "Garam yang dapat dihasilkan

Potensi lain di NTT yang memerlukan dukungan infrastruktur Kementerian PUPR menurut Frans adalah bidang pertanian. Apalagi saat ini Pemerintah Provinsi NTT sedang mengembangkan produksi jagung.

daerah kita sebanyak 120 ton garam per hektar. Kalau daerah lain seperti di Madura hanya 60-70 ton. Saat ini sedang dibangun pabrik garam di Kupang," ucapnya. Dalam membangun infrastruktur menurut Frans sangat dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi program antar instansi maupun lembaga baik pusat maupun daerah. Hal ini dilakukan agar infrastruktur yang dibangun dapat lebih optimal. Dikatakannya juga bahwa Forum seperti Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) yang juga telah dilaksanakan di Kupang, menjadi sangat bermanfaat untuk mengotimalkan pembangunan infrastruktur, karena dilakukan keterpaduan antar instansi terkait baik pusat maupun daerah.

"Apalagi dalam Pra Konreg juga melibatkan Bappeda. Jadi keterpaduan menjadi kata kunci, karena bila pembangunan infrastruktur dilakukan sendiri-sendiri, hasilnya kurang optimal," tegas Frans. Gubernur yang punya selera humor ini juga telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT untuk bersinergi dengan sektor-sektor lain, sehingga dapat saling mendukung satu sama lain. Dengan cara ini Frans optimis infrastruktur yang dibangun dapat berhasil dengan baik dan dapat bermanfaat untuk masyarakat. **Hendra Djamal**

SUKSESKAN PELAKSANAAN KONSULTASI REGIONAL (KONREG) KEMENTERIAN PUPR, JUNI 2017

Melalui Pelaksanaan Konreg,
Kita Padukan Program Pembangunan Infrastruktur
Tahun Anggaran 2018,
Demi Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PUPR

